

**PERAN GKJ BEJIHARJO BAGI TRANSFORMASI KONFLIK  
GOA PINDUL**



**Disusun Oleh:**

**Dwi Wahyu Prasetya, S.Si.**

**NIM : 54130002**

**TESIS UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MENCAPAI GELAR  
MAGISTER SAINS PADA PROGRAM MAGISTER SAINS PERDAMAIAN DAN  
TRANSFORMASI KONFLIK  
FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Wahyu Prasetya, S.Si

NIM : 54130002

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2015

Saya yang menyatakan,



Dwi Wahyu Prasetya, S.Si.

NIM : 54130002

**TESIS**  
**PERAN GKJ BEJIHARJO BAGI TRANSFORMASI KONFLIK**  
**GOA PINDUL**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Dwi Wahyu Prasetya, S.Si

NIM: 54130002

Dalam ujian Tesis Program Studi S-2 Ilmu Teologi  
Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamaian  
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta  
Dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Sains pada tanggal 2 Oktober 2015.

Pembimbing I



(Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo)

Pembimbing II



(Dr.-Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP.)

Penguji :

1. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D

:



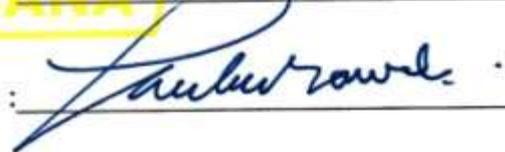
2. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo

:



3. Dr.-Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP

:



Disahkan oleh :

Ketua Program Studi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta



Pdt. Handi Hadiwitanto, M.Th, (Ph.D. cand.)

## KATA PENGANTAR

Persoalan sosial, yang salah satunya adalah konflik sosial merupakan realita sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan dan penyelesaian persoalan sosial tidak bisa hanya dibebankan sebagai tanggung jawab pemerintah. Perlu keterlibatan banyak pihak, dan salah satunya adalah lembaga agama, tidak terkecuali gereja. Selama ini gereja tentu sudah banyak berperan dalam persoalan sosial seperti; kemiskinan, pendidikan, bencana alam. Namun bagaimana jika gereja diperhadapkan dengan konflik sosial di sekitar gereja? Hal itulah yang menjadi titik tolak kajian bagi penyusun. Dengan satu harapan bahwa gereja akan lebih berperan di masyarakat dan keberadaan gereja benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya.

Puji Tuhan karena berkat pertolongan-Nya, penyusun dimampukan menyelesaikan penulisan tesis ini. Demikian juga pihak-pihak yang turut berperan membantu penyelesaian penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bp. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo, selaku pembimbing I.
2. Bp. Dr. Ing. Ir. Paulus Bawole, selaku pembimbing II.
3. Bp. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D, selaku penguji sekaligus pendamping selama saya studi di Pasca Sarjana UKDW, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di jurusan MAPS. Pada kenyataannya, ilmu yang saya dapat sangat bermanfaat dalam pengembangan pelayanan saya sebagai Pendeta jemaat.
4. Istri dan anak saya (Vina Maharani Sulisty Wardhani, S.Si – Feodora Jocelyn Pradhani), yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah gerak hidup saya.
5. Keluarga Bambang Wardoyo di Temanggung dan keluarga Pdt. Widyo Notodirya, S.Th, di Solo.
6. Pdt. Drs. Supiarso
7. Majelis dan warga jemaat GKJ Wonosari Gunungkidul.
8. Pdt. Niluh Artha Wahyuni, S.Th.
9. Majelis dan warga jemaat GKJ Bejiharjo.

Kiranya tulisan ini juga bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Soli Deo Gloria.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v

### **BAB :I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Judul Dan Alasan Pemilihan Judul.....	11
D. Landasan Teori.....	11
E. Tujuan Penulisan.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16

### **BAB II : KONFLIK GOA PINDUL DAN GKJ BEJIHARJO**

A. Goa Pindul.....	17
B. Goa Pindul Sebagai Obyek Wisata.....	19
C. Konflik Goa Pindul.....	26
D. GKJ Bejiharjo.....	31

### **BAB III : ANALISA KONFLIK GOA PINDUL**

A. Teori Konflik	
A.1. Pengertian konflik.....	36
A.2. Strategi Berkonflik.....	38
A.3. Sumber-sumber konflik.....	40
A.4. Analisa konflik.....	41
A.5. Pendekatan pengelolaan konflik.....	42
B. Analisa Konflik Goa Pindul	
B.1. Sumber-sumber konflik Goa Pindul.....	44
B.3. Pemetaan alur konflik Goa Pindul.....	48
B.3. Segitiga SPK (Sikap, Perilaku, Konteks).....	49
B.4. Lensa pemetaan konflik	
a. Lensa pertama: Siapa.....	50

b. Lensa kedua: Apa dan Mengapa.....	51
c. Lensa ketiga: Bagaimana.....	53
d. Lensa keempat: Kapan dan dimana.....	54

#### **BAB IV : MISI PERDAMAIAN DAN TRANSFORMASI**

A. Dasar Mengenai Misi Perdamaian Dan Transformasi	
A.1. Misi Allah.....	58
A.2. Misi Gereja.....	65
A.3. Misi Perdamaian dan Transformasi.....	73
B. Misi GKJ Bejiharjo.....	86

#### **BAB V : STRATEGI PERDAMAIAN GKJ BEJIHARJO**

##### **DALAM TRANSFORMASI KONFLIK GOA PINDUL**

A. Peran Gereja Dalam Mewujudkan Perdamaian Dan Transformasi Konflik	
A.1. Pencegahan ( <i>Prevention</i> ).....	91
A.2. Resolusi ( <i>Resolution</i> ).....	97
A.3. Penahanan ( <i>Containment</i> ).....	99
B. Strategi Perdamaian GKJ Bejiharjo dalam transformasi konflik Goa Pindul	
B.1. Mediator: Mendamaikan konflik kepentingan.....	99
B.2. Equalizer: Demokratisasi kekuasaan.....	105
B.3. Transformasi konflik Goa Pindul.....	112

<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>127</b>
------------------------------	------------

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- a. Denah Desa Bejiharjo dan Goa Pindul
- b. Peta Letak Pokdarwis di Desa Bejiharjo
- c. Foto-foto Pokdarwis
- d. Diagram resume verbatim
- e. Resume verbatim
- f. Daftar Informan
- g. Verbatim

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Karakter masyarakat Bejiharjo, Gunungkidul, terkenal dengan sikapnya yang ramah, santun, tenggang rasa (Jawa; *Tepa slira*), gotong royong, dan menjaga kerukunan. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan, saling membantu.<sup>1</sup> Maka masih ada tradisi-tradisi yang dilestarikan agar sikap-sikap tersebut tidak luntur. Misalnya tradisi bersih desa (*Rasulan*). Setiap warga, apapun latar belakangnya, akan ambil bagian dalam kegiatan tersebut, baik daya maupun dana. Bahkan yang merantau juga akan berusaha pulang kampung saat perayaan bersih desa. Tradisi tersebut menjadi media pertemuan warga masyarakat yang bertujuan menjaga kerukunan dan ikatan persaudaraan. Tradisi lainnya adalah *pertemuan trah*. Pertemuan trah merupakan bentuk dari sebuah sistem kekerabatan di Jawa. *Trah* dengan *alur-waris*, (*ambilineal ancestor-oriented kingroup*), adalah suatu kelompok kekerabatan yang berpusat kepada satu nenek moyang, meski tidak lagi tinggal dalam satu desa atau bahkan terpecah dikota-kota yang jauh.<sup>2</sup> Atau dapat dikatakan sebagai kelompok kekerabatan yang memiliki hubungan darah perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Jadi pertemuan trah adalah pertemuan yang berdasarkan garis keturunan atau silsilah sebuah keluarga. Meski tidak berada disatu wilayah, namun dalam upaya membina kekerabatan akan ada yang menjadi penghubung untuk tetap membina hubungan kekerabatan tersebut.<sup>3</sup>

Namun, karakter atau sikap masyarakat Bejiharjo itu terancam mengalami kelunturan. Hal itu berkaitan dengan terjadinya konflik Goa Pindul yang melibatkan pengelola dan pemilik lahan yang masing-masing didukung oleh kelompok warga masyarakat. Sejak terjadi konflik, warga masyarakat yang semula rukun, harmonis, terancam terpecah atau mengalami kerenggangan kohesi sosial. Masyarakat menjadi tidak tentram.<sup>4</sup> Sikap

---

<sup>1</sup> F.M. Suseno, *Etika Jawa*, ( Jakarta: Gramedia, 1984), h.39.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.156.

<sup>3</sup> Ibid, 157.

<sup>4</sup> Kedaulatan Rakyat, 11 Maret 2013. Kesaksian warga masyarakat yang bernama Istiyani, Ny.Pawiro Tugi, Supiyo, Sagiyanto.

masyarakat yang semula ramah dan permisif, berubah menjadi kaku dan penuh curiga, mudah marah dan mudah tersulut isu atau mudah terprovokasi.<sup>5</sup>

Hal tersebut bahkan menjadi keprihatinan warga Bejiharjo yang berada di perantauan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Bejiharjo (IKBB), yang mana mereka menginginkan agar Bejiharjo kembali damai.<sup>6</sup> Mereka ikut prihatin karena faktor egoisme menyebabkan masyarakat terpecah dan dampaknya tentu saja mencoreng nama baik atau citra desa Bejiharjo. Berkali-kali warga masyarakat terlihat terpecah karena mendukung salah satu pihak, dengan turut serta melakukan demonstrasi baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>7</sup> Spanduk-spanduk provokatif juga banyak terpampang di sekitar Bejiharjo. Bahkan kini konflik telah meluas atau berkembang, yaitu persaingan tidak sehat antar pengelola dalam menerapkan tarif bagi pengunjung, transaksi antara pengelola dengan para joki (penawar sekaligus pengantar pengunjung kepada pengelola).<sup>8</sup> Dampaknya tentu saja akan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Goa Pindul. Hal itu berarti secara tidak langsung justru akan merugikan masyarakat karena keuntungan yang selama ini didapat akan berkurang atau bahkan tidak ada pendapatan lagi. Jadi yang dikawatirkan justru pada akhirnya buah dari konflik Goa Pindul adalah masyarakat yang jadi korbannya.<sup>9</sup>

Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat destinasi wisata baru yang banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, yaitu Goa Pindul. Goa Pindul dibuka sebagai destinasi wisata mulai pertengahan tahun 2010. Namun sejak akhir tahun 2012, terjadi konflik. Konflik bermula ketika salah satu pemilik tanah di atas Goa Pindul yaitu Atik Damayanti ingin ikut serta dalam pengelolaan Goa Pindul yang dijalankan oleh Subagyo (ketua Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo). Atik Damayanti menghendaki sistem bagi hasil pendapatan sebesar Rp. 20.000,- dari tarif/tiket yang diterapkan bagi setiap pengunjung yaitu sebesar Rp. 30.000,-. Permintaan tersebut tidak disetujui oleh Subagyo dan anggota kelompoknya.

---

<sup>5</sup> Kedaulatan Rakyat, 22 April 2014.

<sup>6</sup> Harian Jogja, 13 Maret 2013.

<sup>7</sup> Tribun Jogja, 15 Maret 2013.

<sup>8</sup> Kedaulatan Rakyat, 19 Desember 2014, dan wawancara dengan Suyono, anggota pengelola Tunas Wisata.

<sup>9</sup> Kedaulatan Rakyat, 11 Maret 2013.

Upaya damai telah dilakukan, namun upaya tersebut tidak menuai kata sepakat karena besaran nominal yang ditawarkan oleh pengelola tidak disetujui oleh pihak Atik Damayanti. Sedangkan pihak pengelola juga keberatan jika nominalnya sesuai dengan permintaan pihak Atik Damayanti. Menurut Atik Dayamanti, dirinya merupakan pihak yang berhak mengelola Goa Pindul karena sebagai pemilik sah lahan yang ada di atas Goa Pindul. Sementara Subagyo dan pengelola lainnya berpendapat bahwa goa tersebut adalah milik Negara, yang artinya dapat dipergunakan atau dikelola oleh/dan untuk masyarakat. Akibatnya konflik semakin mengalami eskalasi atau peningkatan. Atik Damayanti membawa persoalan hak pengelolaan ke ranah hukum disertai dengan berbagai dakwaan terhadap Subagya. Pihak Atik Damayanti juga menggugat pemerintah daerah Gunungkidul yang telah mengizinkan pengoperasionalan Goa Pindul oleh pengelola yang kini bahkan telah berkembang menjadi 10 pengelola.<sup>10</sup> Meskipun telah ada upaya penyelesaian baik oleh pemerintah desa Bejiharjo dan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, namun sampai saat ini konflik tersebut belum selesai.

Perkembangan Goa Pindul yang semakin tersohor serta mendatangkan keuntungan yang sangat besar, menyebabkan semakin banyak orang yang ingin terlibat dalam pengelolaan, baik dari masyarakat Bejiharjo maupun di luar Bejiharjo. Hal ini dikarenakan adanya peluang yang terbuka yaitu struktur ekonomi dan sistem kepemilikan lahan (landownership). Hal itu ditunjukkan oleh adanya klaim-klaim yang dibangun oleh setiap aktor dalam memperebutkan hak atas pengelolaan daerah wisata tersebut (jumlah orang yang terlibat dalam setiap Pokdarwis semakin banyak dan jumlah Pokdarwis yang mengelola pun semakin banyak). Bahkan pemerintah daerah juga terkesan ikut ambil keuntungan di tengah-tengah situasi konflik yang belum selesai, yaitu dengan penerapan retribusi sebesar Rp. 10.000,- bagi setiap pengunjung yang memasuki kawasan Bejiharjo. Karena tidak kunjung ada penyelesaian, kini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut akhirnya meluas, bukan hanya pengelola dan salah satu pemilik lahan saja, namun melibatkan pemerintah dan antar anggota masyarakat baik warga desa Bejiharjo maupun di luar desa Bejiharjo. Dengan begitu konflik Goa Pindul telah berubah bentuk baik persoalannya maupun pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>10</sup> Tribun Jogja, 25 Februari 2013.

Sementara, di sekitar Desa Bejiharjo terdapat beberapa gereja yaitu GKJ (Gereja Kristen Jawa) Bejiharjo, GBI (Gereja Baptis Indonesia) Anugerah, dan GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Grogol. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah ketika di Desa Bejiharjo saat ini sedang terjadi konflik berkaitan dengan Goa Pindul, apakah gereja-gereja tersebut juga telah berusaha turut serta atau ambil bagian dalam upaya penyelesaian konflik Goa Pindul?

Secara khusus pertanyaan tersebut ditujukan bagi GKJ Bejiharjo. Dari penelitian awal melalui wawancara dengan pendeta dan anggota majelis GKJ Bejiharjo, ternyata ditemukan bahwa jawabannya adalah belum pernah dilakukan upaya penyelesaian konflik Goa Pindul oleh gereja. Dalam wawancara dengan Pendeta Niluh Putu Artha Wahyuni selaku Pendeta GKJ Bejiharjo dan bapak Hargo Warsono selaku anggota majelis GKJ Bejiharjo, ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh keduanya mengapa GKJ Bejiharjo tidak berperan dalam upaya penyelesaian konflik Goa Pindul, yaitu :

*a. Persoalan konflik Goa Pindul tidak ada kaitannya dengan GKJ Bejiharjo.*

Disampaikan oleh mereka bahwa jika saja dalam kasus konflik Goa Pindul, permasalahannya berkaitan dengan keberadaan GKJ Bejiharjo sebagai institusi atau ada warga gereja GKJ Bejiharjo yang terlibat, maka GKJ Bejiharjo akan berperan dalam upaya penyelesaiannya. Pdt. Niluh menyampaikan, karena kasus konflik Goa Pindul tidak ada sangkut pautnya dengan institusi GKJ Bejiharjo dan tidak ada warga gerejanya yang terlibat dalam kasus tersebut, maka gereja memandang bahwa persoalan tersebut bukan menjadi ranah persoalan gereja.<sup>11</sup> Sehingga gereja tidak perlu terlibat dalam upaya penyelesaiannya.

*b. Jika GKJ Bejiharjo terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Goa Pindul, takut terkena dampak negatif.*

Dalam wawancara diungkapkan bahwa ada ketakutan atau kekawatiran jika GKJ Bejiharjo sebagai lembaga keagamaan terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Goa Pindul. Alasannya antara lain karena persoalan tersebut adalah persoalan sosial bukan persoalan gereja atau persoalan agama, atau tidak berkaitan dengan konflik agama.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pendeta GKJ Bejiharjo yaitu Pdt. Niluh Artha Wahyuni, (20 Januari 2014, Pukul 17.00 WIB)

Seandainya gereja terlibat justru dikawatirkan akan memperkeruh suasana konflik. Persoalan sosial akan meluas menjadi persoalan agama. Alasan tersebut didasarkan bahwa di Bejiharjo ada beberapa kelompok radikal Islam, sehingga ada ketakutan jika gereja terlibat maka akan berimbas pada persoalan agama.<sup>12</sup> Di mana kelompok-kelompok dari agama lain akan mempertanyakan kaitannya gereja dengan konflik yang ada. Dengan begitu keberadaan gereja yang selama ini aman dapat terancam.

- c. *GKJ Bejiharjo tidak mengetahui cara-cara dalam penyelesaian konflik Goa Pindul.* Diungkapkan dalam wawancara tersebut bahwa gereja sebenarnya juga ikut merasa prihatin terhadap kasus konflik Goa Pindul yang tidak kunjung selesai, terlebih lagi awal pembukaan Goa Pindul justru tidak lepas dari pemikiran atau inisiatif dari beberapa warga gereja GKJ Bejiharjo.<sup>13</sup> Namun, karena kasus konflik Goa Pindul menyangkut banyak hal antara lain persoalan hak pengelolaan, persoalan hukum atau undang-undang, dan kini melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah, maka GKJ Bejiharjo merasa tidak memiliki daya kemampuan untuk ikut dalam upaya penyelesaian kasus konflik Goa Pindul. Artinya andai gereja hendak terlibat dalam upaya penyelesaian konflik namun tidak tahu cara apa dan langkah apa yang harus ditempuh.<sup>14</sup>

Kenapa dalam penulisan ini yang menjadi sorotan adalah GKJ Bejiharjo? Alasan yang *pertama* adalah GKJ Bejiharjo merupakan bagian dari wilayah pemerintahan desa Bejiharjo dan sebagai bagian dari masyarakat sekitar Goa Pindul yang juga punya tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.<sup>15</sup> Dalam hal inilah GKJ Bejiharjo meski berada di luar lingkaran konflik secara langsung, namun moral etik gereja sebagai bagian dari masyarakat yang sedang mengalami pergumulan bersama tentunya dipertanyakan jika kenyataannya gereja justru apatis. Bukankah penyelesaiannya juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab gereja sebagai bagian dari masyarakat yang sedang berkonflik?

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Majelis GKJ Bejiharjo yaitu Bp. Hargo warsono, (20 Januari 2014, Pukul 19.00 WIB)

<sup>13</sup> Di antaranya anggota majelis yang ada dalam wawancara.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pendeta GKJ Bejiharjo yaitu Pdt. Niluh Artha Wahyuni, (20 Januari 2014, Pukul 17.00 WIB).

<sup>15</sup> Secara administratif GKJ Bejiharjo termasuk dalam wilayah Dusun Kulwo, Desa/Kelurahan Bejiharjo. Letak gedung gereja induk GKJ Bejiharjo tepat berada didepan gedung balai Desa Bejiharjo. Gereja tersebut berjarak ± 5 km utara kota Wonosari dan ± 1,5 km dengan Goa Pindul.

Alasan yang *kedua* adalah bahwa awal mula pengelolaan Goa Pindul sebagai destinasi wisata tidak lepas dari peran warga gereja GKJ Bejiharjo, yaitu bapak Hargo Warsono dan bapak Elly Martono. Bapak Hargo Warsono yang kala itu menjadi ketua Desa Budaya di Desa Bejiharjo memberikan support atau dorongan kepada saudara Subagyo untuk mengeksplorasi Goa Pindul sebagai tempat wisata setelah ada anjuran dari pemerintah untuk membentuk desa Bejiharjo sebagai desa wisata dan membentuk Kelompok Sadar Wisata. Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Elly Martono, yang kala itu bekerja sebagai pegawai negeri sipil di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

Artinya keduanya (yang kini juga menjabat sebagai ketua dan anggota Majelis di GKJ Bejiharjo) mengetahui perihal awal mula dibukanya Goa Pindul sebagai destinasi wisata dan dengan kata lain meski tidak secara langsung mereka ikut berperan dalam pembukaan pengelolaan Goa Pindul. Meski peran dua orang tersebut atas nama pribadi, namun mereka pun statusnya sebagai warga gereja GKJ Bejiharjo. Dengan demikian jika Goa Pindul yang awal mula pembukaannya tidak lepas dari peran warga gereja dan ketika kemudian terjadi konflik, bukankah hal itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab gereja? Atau dengan kata lain, bukankah sebenarnya GKJ Bejiharjo memiliki potensi untuk ambil bagian dalam upaya penyelesaian konflik Goa Pindul?

Sedangkan alasan yang *ketiga* adalah GKJ Bejiharjo sebagai gereja yang memiliki tugas panggilan atau peran yaitu fungsi agensi. Bob Moffit dan Karla Tesch dalam bukunya yang berjudul “*Andaikan Yesus Kepala Daerah*”, hendak mengajak setiap gereja sebagai sebuah lembaga untuk merenungkan dan kritis terhadap hal-hal yang ada dalam benak gereja-gereja jika mendapatkan pertanyaan sebagai berikut; “*Apa yang akan Yesus lakukan andaikan Ia kepala daerah?*”<sup>16</sup> Apa yang akan dilakukan Yesus ketika melihat persoalan-persoalan yang dihadapi Negara, masyarakat, rumah tangga atau pun individu seperti halnya konflik sosial, ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan kekuasaan, penindasan dan ketidakpastian hukum seperti yang marak terjadi di jaman sekarang ini? Tindakan apa yang akan Dia ambil dan upaya apa yang akan dilakukan agar persoalan-persoalan tersebut selesai? Tentu semua gereja sepakat bahwa inti jawabannya adalah Yesus tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mengambil sikap dan tindakan sebagai upaya penyelesaian, yang semua bermuara pada kedamaian seluruh

---

<sup>16</sup> Bob Moffit dan Karla Tesch, *Andaikan Yesus Kepala Daerah*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010), h.11.

ciptaan. Karena untuk itulah Dia datang ke dunia, yaitu menghadirkan damai sejahtera, seperti yang dikehendaki Bapa yang dikenal dengan istilah *missio Dei*.<sup>17</sup>

Namun pada kenyataannya Yesus bukanlah kepala daerah. Dia bukanlah pemimpin politis dan birokrasi. Jika demikian, apa maksud dari pertanyaan tersebut? Pertanyaan tersebut sebenarnya benuansa sindiran bagi gereja, karena pertanyaan tersebut justru mengajak gereja-gereja untuk memikirkan kembali makna keberadaannya di dunia ini yaitu tentang tugas panggilan gereja di tengah-tengah dunia. Kehadiran Yesus ke dunia bukan merubah dunia, meski Dia mampu, tapi kehadiranNya adalah merubah manusianya dan menjadikannya agen-agen perubahan bagi dunia ini. Ketika Yesus hadir di dunia, Dia bukan hanya dalam rangka menyelamatkan manusia dari dosa, namun Dia juga mengajarkan nilai-nilai yang harus dihidupi oleh semua manusia, sehingga apa yang menjadi dambaan hidup manusia di dunia ini yaitu damai sejahtera akan terwujud. Dalam hal inilah gereja perlu *mengejawantahkan* apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu menjadi agen-agen transformasi di tengah-tengah kehidupan bersama. Khususnya dalam mensikapi banyaknya persoalan masyarakat, khususnya konflik yang terjadi di sekitar kehidupan gereja. Sebab gereja merupakan sebuah persekutuan yang dari awal terbentuknya merupakan rantai transformasi yang Yesus lakukan melalui murid-muridnya.

Pertanyaan tersebut sesungguhnya menjadi cambuk bagi gereja-gereja untuk melihat kembali tentang *missio ecclesiae* di mana gereja itu berada. Menurut Widi Artanto, gereja perlu peka terhadap persoalan dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai respon atau partisipasi dalam *missio Dei*.<sup>18</sup> Dengan begitu gereja harus memahami dan menyadari tentang tugas panggilannya yaitu fungsi agensi demi terwujudnya *missio Dei* yaitu terwujudnya tanda-tanda Kerajaan Allah antara lain cinta kasih, kesejahteraan, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.<sup>19</sup> Misi Allah memang hanya satu dan tidak berubah, yaitu mendatangkan Kerajaan Allah, tapi dalam pengimplementasiannya gereja dipanggil untuk menggali sesuai dengan kebutuhan konteks gereja.

---

<sup>17</sup> D.J. Bosch, *Transformasi Misi Kristen*, (Jakarta; BPK Gunungmulia, 2000), h.15.

<sup>18</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2008), h.69.

<sup>19</sup> Widi Artanto, *Gereja dan Misi-Nya; Mewujudkan kehadiran Gereja dan misi-Nya di Indonesia*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2015), h.12.

Namun benarkah gereja telah melakukan transformasi pemikiran-pemikiran Yesus dalam kehidupan sekitarnya? Pertanyaan yang tidak cukup sekedar dijawab sudah atau belum, namun perlu melihat kembali kiprah gereja selama ini, khususnya ketika marak terjadi persoalan-persoalan sosial di sekitar gereja. Di dunia pada umumnya, dan secara khusus lagi di Indonesia, keberadaan gereja sekarang ini banyak menjadi sorotan dalam hal kiprahnya. Apa sebenarnya relevansi gereja di tengah dunia modern sekarang ini?<sup>20</sup> Pertanyaan yang sangat menohok bagi gereja, karena banyak yang sudah mulai pesimis tentang keberadaan dan peran gereja. Sebab jika mau jujur, gereja-gereja yang ada saat ini memang masih minim kontribusinya bagi perbaikan kondisi masyarakat di sekitar gereja.

Gereja layaknya lembaga keagamaan lainnya yang banyak membangun menara gading. Gereja berkembang di mana-mana, namun tidak banyak memberikan perubahan. *Missios ecclesiae* lebih banyak dipahami dengan mencari jiwa sebanyak-banyaknya, membaptis dan menjadikan orang sebagai anggota gereja. Gereja hanyalah lembaga rohani dan bukan ranahnya untuk memikirkan persoalan-persoalan duniawi seperti halnya sosial (konflik sosial), ekonomi, politik.<sup>21</sup> Meski kini tidak semua gereja memiliki konsep misi seperti didepan, namun sebagian besar masih berkatat pada konsep yang sama. Padahal sesungguhnya misi gereja bukanlah “ekspansi agama”.<sup>22</sup> Memang bukan berarti tidak ada sama sekali kiprah gereja di masyarakat, misalnya saat ini banyak gereja-gereja yang mengembangkan pelayanan berupa PEJM (Pengembangan Ekonomi Jemaat dan Masyarakat), pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, bantuan tanggap darurat bencana alam, serta bantuan pendidikan.

Namun secara khusus, bagaimana respon gereja tatkala terjadi persoalan-persoalan di sekitar gereja yang secara langsung tidak ada sangkut pautnya dengan gereja, seperti halnya konflik sosial? Secara umum ada kecenderungan bahwa gereja diam. Diam dalam arti mungkin saja gereja membicarakan, mempercakapkan namun tidak berlanjut pada langkah ambil bagian dalam sebuah tindakan penyelesaian. Maka tidak heran pula jika masyarakat sekitar gereja mempertanyakan peran keberadaan gereja selama ini. Bahkan secara ekstrim, tidak sedikit pula gereja yang ketika menghadapi permasalahan baik itu

---

<sup>20</sup> Eka Darmaputera, *Hidup yang Bermakna*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), h.26.

<sup>21</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2008), h.16.

<sup>22</sup> Widi Artanto, *Gereja dan Misi-Nya; Mewujudkan kehadiran Gereja dan misi-Nya di Indonesia*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2015), h.10.

secara hukum maupun permasalahan lainnya, masyarakat sekitar gereja acuh dan bahkan ikut serta dalam upaya penyegelan dan penutupan gereja.

Seperti pernyataan Bishop Vaughn<sup>23</sup> yang dikutip oleh Bob Moffit dan Karla Tesch<sup>24</sup>; “*Jika gereja anda besok tutup, akankah penduduk kota anda memperhatikan? Akankah orang-orang kota memprotes?*” Ketika sebuah gereja tutup, respon masyarakat akan menjadi tolok ukur atas keberadaan sebuah gereja. Jika keberadaan sebuah gereja memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya, maka dapat dipastikan akan banyak pihak yang memperhatikan dan mempertanyakan, atau memprotes penutupan gereja. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tak ada satupun yang peduli, bahkan mungkin saja masyarakat di sekitar gereja yang ditutup akan mengadakan “*selamatan*”<sup>25</sup> atas penutupan gereja itu.

Jadi dengan adanya konflik justru menjadi autokritik bagi gereja tentang peran gereja bagi masyarakat. Artinya, ketika gereja bersedia berperan dan dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat sekitar, disatu sisi memang demi kelangsungan hidup gereja atau keberadaan gereja atau kenyamanan gereja. Namun tentunya bukan semata-mata hanya untuk hal tersebut, bukankah gereja memang dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk melanjutkan estafet perubahan (fungsi agensi)? Bukankah peran gereja bagi masyarakat itu sebuah kemestian yang tidak bisa dihindari oleh gereja?

Pertanyaan tersebut itu tidak terkecuali ditujukan bagi GKJ Bejiharjo yang berada di wilayah Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Di mana di sekitar GKJ Bejiharjo terjadi sebuah konflik sosial berkenaan dengan keberadaan Goa Pindul dan pengelolaannya yang berlangsung sejak akhir tahun 2012, dan sampai sekarang konflik tersebut belum selesai. Sehingga pertanyaan yang muncul dalam benak penyusun adalah bagaimana peran gereja (secara khusus GKJ Bejiharjo) sebagai bagian dari masyarakat Bejiharjo yang sedang berkonflik terkait dengan upaya penyelesaian konflik Goa Pindul? Sebab pada kenyataannya, GKJ Bejiharjo baik sebagai lembaga maupun sebagai sebuah komunitas tidak ambil bagian dalam upaya penyelesaian konflik Goa Pindul.

---

<sup>23</sup> Bishop Vaughn Mc Laughlin, Potter’s House Christian Fellowship, [www.potters-house.org](http://www.potters-house.org).

<sup>24</sup> Bob Moffit dan Karla Tesch, *Andaikan Yesus Kepala Daerah*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010), h.222.

<sup>25</sup> *Selamatan* adalah sebuah ritual dalam tradisi Jawa yang isinya adalah ucapan syukur.

Bertitik tolak dari pandangan Bob Moffit dan Karla Tesch dan D.J. Bosch didepan, bukankah GKJ Bejiharjo sedang dipertanyakan mengenai peran dan tugas panggilannya sebagai sebuah gereja. Bukankah GKJ Bejiharjo juga dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk mewujudkan *missio Dei*? Oleh karena itu, dalam penyusunan tulisan ini akan diawali dengan penelitian mengapa GKJ Bejiharjo tidak terlibat dalam penyelesaian konflik Goa Pindul. Sehingga akan diteliti apa yang sebenarnya ada dalam benak anggota jemaat, pendeta dan anggota majelis di GKJ Bejiharjo mengenai konsep perdamaian berkaitan dengan konflik sosial khususnya kasus konflik Goa Pindul. Karena dasar atau titik tolak dari keterlibatan gereja dalam penyelesaian konflik sosial bergantung pada konsep mengenai perdamaian yang ada pada para pemimpin gereja dan jemaatnya. Demikian juga perlu digali dan dicari mengenai kemungkinan diterapkannya cara-cara atau metode penyelesaian konflik yang dapat dilakukan oleh GKJ Bejiharjo, dengan harapan pada akhirnya GKJ Bejiharjo dapat berperan atau memberikan sumbangsih untuk menyelesaikan konflik Goa Pindul.

Penelitian ini sebenarnya juga penting bagi gereja-gereja pada umumnya. Sebab jika dicermati hampir sebagian besar gereja belum terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tatkala konflik sosial terjadi di sekitar gereja. Melalui pembahasan ini, kiranya dapat menggugah kepekaan gereja terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Selain itu kiranya dapat memberikan sumbangsih bagi gereja-gereja mengenai cara-cara penyelesaian konflik sosial di sekitar gereja masing-masing. Dengan demikian harapannya adalah jika gereja mampu berperan di tengah masyarakat khususnya penyelesaian konflik sosial, maka gereja akan turut serta dalam membangun peradaban bangsa Indonesia yang damai dan sejahtera.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Mengapa GKJ Bejiharjo terkesan diam mensikapi konflik Goa Pindul.
2. Bagaimana GKJ Bejiharjo memahami tentang perdamaian.
3. Bagaimana GKJ Bejiharjo memahami perannya sebagai agen perdamaian.
4. Strategi apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh GKJ Bejiharjo, demi terwujudnya perdamaian atau penyelesaian atas kasus konflik Goa Pindul.

### C. Judul Dan Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang dan perumusan masalah di depan, maka tesis ini di beri judul :

#### PERAN GKJ BEJIHARJO BAGI TRANSFORMASI KONFLIK GOA PINDUL

Adapun alasan penyusun memilih judul tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana konsep perdamaian dalam gereja khususnya GKJ Bejiharjo. Bagaimana GKJ Bejiharjo menyikapi konflik sosial di sekitar gereja dalam hal ini adalah konflik Goa Pindul jika dihubungkan dengan misi gereja, serta peran yang dapat dilakukan oleh GKJ Bejiharjo dalam upaya penyelesaian kasus konflik Goa Pindul.

### D. Landasan Teori

Adapun dasar pembahasan tentang konsep perdamaian yang ada di GKJ Bejiharjo adalah buku yang berjudul *Menjadi Gereja Misioner dalam konteks Indonesia*<sup>26</sup> dan buku *Gereja dan Misi-Nya; Mewujudkan kehadiran Gereja dan misi-Nya di Indonesia*,<sup>27</sup> yang mana dua buku tersebut karangan Widi Artanto. Buku tersebut berisikan tentang pentingnya gereja-gereja di Indonesia untuk melihat kembali misi yang selama ini dilakukan oleh gereja dalam kasus ini tentunya GKJ Bejiharjo sesuai dengan konteks keberadaannya di seputar kehidupan masyarakat yang sedang berkonflik. Antara lain mengenai dasar-dasar misi gereja, konteks misi gereja di Indonesia dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu dijawab melalui peran gereja. Setelah gereja melihat kembali misinya, kiranya dapat menghantarkan gereja untuk merekonstruksi ulang misinya sesuai dengan konteks. Harapannya GKJ Bejiharjo akan menemukan makna panggilannya sebagai gereja di tengah masyarakat dan selalu merekonstruksi misinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bejiharjo.

Keberadaan gereja di dunia ini tentu tidak terjadi begitu saja. Demikian pula eksistensi gereja di dunia ini, tentu ada tujuannya. Gereja ada hanya karena karya Allah, dan gereja ada dalam rangka perutusan dari Allah yaitu tentang apa yang menjadi kehendak Allah atas dunia ini. Kehendak Allah itu dinyatakan melalui pengajaran dan seluruh kehidupan

---

<sup>26</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner; Dalam Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2008).

<sup>27</sup> Widi Artanto, *Gereja Dan Misi--Nya Mewujudkan kehadiran Gereja dan misi-Nya di Indonesia*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2015).

Tuhan Yesus Kristus baik dalam rangka keselamatan manusia maupun tata kehidupan yang baik atas dunia ini. Gereja diutus untuk mewartakan karya penyelamatan Allah dalam Yesus, namun sekaligus untuk turut serta menata kehidupan dunia ini menjadi baik.

Menurut Widi Artanto, misi gereja adalah misi Kerajaan Allah. Misi Allah di dunia ini bukanlah gereja, melainkan Kerajaan Allah. Ini penting sekali sebagai dasar bagi gereja untuk menentukan sikap dan cara keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, konsep dasar misi gereja dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dihidupi dalam sebuah gereja. Jika nilai-nilai dalam gereja adalah tentang Kerajaan Allah, niscaya misinya pun tentang Kerajaan Allah.

Implementasi misi Kerajaan Allah;<sup>28</sup>

- a. Misi gereja menyangkut egosentrisme gereja tentang Kerajaan Allah yang sering dipahami hanya bagi orang Kristen saja.
- b. Berkaitan dengan keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi masyarakat.
- c. Memperjuangkan keadilan.
- d. Menampakkan tanda keadilan dengan membentuk badan pelayanan sosial dan badan pelayanan hukum.
- e. Vitalisasi gereja.

Sedangkan dalam buku *Teori Konflik Sosial*,<sup>29</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan mengenai pengertian konflik, sumber-sumber konflik, dampak positif dan negatif dari sebuah konflik, sikap-sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkonflik, serta hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik. Buku tersebut secara rinci dan runtut memaparkan tentang proses terjadinya sebuah konflik dan proses perjalanan konflik serta pasang-surutnya konflik, yang pada akhirnya menawarkan proses akhir yaitu *problem solving*. Buku tersebut pada dasarnya secara praktis lebih mudah untuk dipahami alurnya, dan tentunya dapat untuk menalar sebuah konflik sosial. Berkenaan dengan analisa mengenai sumber-sumber konflik dapat dilihat berdasarkan pendapat para tokoh seperti Tilly, Simmel, Talcott Parson yang terdapat dalam buku

---

<sup>28</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner; Dalam Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2008), h.298-309.

<sup>29</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2011).

*Theories Of Civil Violence*.<sup>30</sup> Buku tersebut memaparkan tentang hal-hal mendasar yang sering menjadi alasan seseorang untuk “berkonflik” atau kelompok untuk kohesi melakukan perlawanan dalam bentuk konflik. Sedangkan dalam rangka mengelola dan atau menganalisa konflik, perlu didukung dengan kecakapan atau ketrampilan serta strategi untuk bertindak seperti yang terdapat dalam buku *Mengelola Konflik*,<sup>31</sup> merupakan kumpulan tulisan dari para pakar mengenai konflik di antaranya adalah Simon Fisher yang memaparkan mengenai cara-cara atau tahapan analisa konflik.

Ketiga buku tersebut pada prinsipnya menjadi acuan dalam penulisan ini karena kemudahan dalam menerapkannya dan harapannya juga memudahkan bagi siapapun untuk menggunakannya. Namun, harapan dalam pembahasan ini adalah bukan hanya tercipta sebuah penyelesaian dari sebuah konflik, lebih dari itu, diharapkan bermuara pada terwujudnya *transformasi konflik*, seperti yang dikemukakan baik oleh John Paul Lederach<sup>32</sup> maupun bagian dari materi buku mengelola konflik yang dipaparkan oleh Simon Fisher dan kawan-kawan. Paul Lederach memberikan gambaran secara jelas dan mudah dinalar meskipun melalui pemaparan singkat mengenai pentingnya tujuan akhir dari transformasi konflik. Buku-buku tersebut sangat relevan digunakan dalam rangka menalar kasus konflik Goa Pindul. Dalam rangka mengerti akar permasalahan, lensa pendekatan dan analisa, melihat dinamika konflik, serta pilihan strategi dalam upaya keterlibatan GKJ Bejiharjo baik dalam rangkan rekonsiliasi bahkan transformasi konflik Goa Pindul.

## **E. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan konsep perdamaian dan keterlibatan GKJ Bejiharjo dalam transformasi konflik tatkala menghadapi masalah sosial di sekitarnya.
2. Memberi sumbangsih bagi GKJ Bejiharjo dalam mewujudkan perannya di Desa Bejiharjo yaitu menciptakan perdamaian melalui upaya penyelesaian kasus konflik Goa Pindul.
3. Menggugah kesadaran gereja-gereja pada umumnya untuk peka dan ambil bagian dalam upaya penyelesaian terhadap kasus-kasus konflik sosial di sekitar gereja.

---

<sup>30</sup> James B. Rule, *Theories Of Civil Violence*, (University of California Press: 1988).

<sup>31</sup> Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta: British Council Indonesia, 2001).

<sup>32</sup> John Paul Lederach, *Transformasi Konflik*, (Yogyakarta, Duta Wacana University Press, 2005).

4. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai peran yang dapat diambil atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh gereja dalam upaya penyelesaian konflik sosial di sekitar gereja.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu dengan survei lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya tengah terjadi yaitu mengenai masalah aktual, proses konflik dan dampak sosial terjadinya konflik Goa Pindul bagi masyarakat Bejiharjo.<sup>33</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah etnometodologi.<sup>34</sup> Dalam survei tersebut akan dilakukan penelitian dengan mengambil sampel dari pihak yang berkonflik langsung, dari beberapa anggota pengelola, dari perangkat desa, dari warga gereja GKJ Bejiharjo, dan dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah menangani konflik Goa Pindul. Karena konflik Goa Pindul yang bukan hanya melibatkan oknum, tapi juga masyarakat dan pemerintah daerah Gunungkidul, maka survei lapangan dilakukan di lokasi Goa Pindul, di sekretariat para pengelola, dan kepada warga gereja GKJ Bejiharjo dan di kantor dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

### **b. Pengumpulan Data**

Informan yang dipilih antara lain; saudara Subagyo sebagai pihak yang dituntut, pemilik lahan, perwakilan anggota pengelola, perangkat desa (dalam hal ini Kepala Desa Bejiharjo), kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan warga gereja serta Majelis GKJ Bejiharjo. Dengan pertimbangan mereka adalah pihak yang terlibat dalam konflik, pengambil kebijakan, dan warga yang ikut serta merasakan dampak konflik maupun setiap hasil kebijakan penyelesaiannya.

---

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.31-32.

<sup>34</sup> Etnometodologi merupakan pendekatan yang berupaya memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan tata hidup mereka (lingkungannya). Dan juga bagaimana orang-orang melihat kemudian menerangkan, dan menilai keadaan lingkungannya. Pendekatan ini dikembangkan oleh Garfinkel sejak tahun 1950. Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.69.

Sedangkan dalam rangka pengumpulan data, karena penelitian lapangan ini bersifat kualitatif, maka teknik yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, untuk mempermudah dalam mengumpulkan data, dan guna menggali data, menemukan fakta serta memahami persoalan secara konkrit, maka akan dilakukan penelitian berupa interview atau wawancara. Meski dengan kesadaran bahwa pernyataan-pernyataan subyektif akan ditemui dalam proses wawancara. Pihak-pihak yang akan diinterview antara lain; pihak yang berkonflik secara langsung, pemerintah desa Bejiharjo, Kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan bagi gereja dalam hal ini Majelis GKJ Bejiharjo dan warga gereja akan dilakukan dengan wawancara dan quisioner.

*Kedua*, selain wawancara juga dilakukan pengamatan langsung. Artinya langsung melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan untuk merasakan langsung apa yang terjadi. Pengamatan langsung ini juga dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan-perkembangan berita melalui media cetak maupun internet, didokumentasikan, dan dijadikan sebagai referensi pendukung maupun perbandingan. Selain menggunakan penelitian lapangan berupa wawancara dan pengamatan langsung, penulisan ini juga didukung dengan penelitian literatur atau kepustakaan.

c. Pengolahan Data

Dalam mengolahnya akan melalui tahap-tahap sebagai berikut: seluruh data wawancara, pengamatan langsung dan questioner, dokumentasi dari media cetak maupun internet dikumpulkan. Data tersebut kemudian dideskripsikan dalam tulisan yang memuat mengenai fakta-fakta secara ringkas dan teliti. Dari hasil penelitian yang dideskripsikan kemudian dianalisa, dan diinterpretasikan, dengan tujuan akhir adalah saran aksi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> SEAGST Institute of Advanced Pastoral Studies dan Panitia Metode Studi Kasus Jawa, *Studi Kasus Pastoral III-Jawa*, (Jakarta; BPK Gunung Mulia, 1990), h. 248-254.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dirumuskan dalam kerangka sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri atas latar belakang permasalahan, perumusan masalah, judul dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KONFLIK GOA PINDUL DAN GKJ BEJIHARJO**

Berisi deskripsi mengenai sejarah Goa Pindul, sejarah pembukaan pengelolaan Goa Pindul sebagai tempat wisata, dan sejarah kasus konflik Goa Pindul. Selain itu juga pemaparan tentang keberadaan GKJ Bejiharjo sebagai bagian dari masyarakat Bejiharjo, dan kaitannya dengan Goa Pindul dan konflik yang sedang berlangsung. Demikian pula kaitannya dengan keterlibatan warga gereja dan kondisinya sebelum dan sesudah konflik.

### **BAB III : PERDAMAIAN DAN TRANSFORMASI KONFLIK**

Berisi tentang perspektif Alkitab tentang misi Allah, misi Gereja, dan interpretasinya berkaitan dengan panggilan tanggung jawab atau peran gereja dalam upaya terwujudnya perdamaian, baik resolusi maupun transformasi konflik. Dalam bab ini juga berisi analisa mengenai konflik Goa Pindul disertai dengan tinjauan teori mengenai konflik dan aksi-aksi yang dapat dilakukan dalam mensikapi konflik sosial khususnya konflik Goa Pindul untuk mewujudkan perdamaian sosial dan transformasi konflik.

### **BAB IV : STRATEGI PERDAMAIAN GKJ BEJIHARJO DALAM TRANSFORMASI KONFLIK GOA PINDUL**

Dari hasil penelitian, analisa atas realita sosial dan interpretasi mengenai misi gereja tentang perdamaian, maka dalam bab ini akan dipaparkan tentang tawaran aksi atau pilihan strategi yang dapat dilakukan oleh GKJ Bejiharjo untuk ambil bagian dalam menciptakan perdamaian dalam rangka resolusi konflik. Demikian pula strategi dalam rangka keterlibatan GKJ Bejiharjo untuk melakukan transformasi konflik Goa Pindul.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian sampai pemaparan di bab empat dan hal-hal yang dapat dipelajari.

## **BAB V**

### **STRATEGI PERDAMAIAN GKJ BEJIHARJO DALAM TRANSFORMASI KONFLIK GOA PINDUL**

Dalam bab tiga telah dipaparkan mengenai tahapan-tahapan dalam memahami sebuah konflik sosial dan analisa konflik Goa Pindul. Demikian pula telah dipaparkan mengenai kemestian bagi gereja untuk terlibat dalam upaya penyelesaian masalah-masalah sosial, termasuk di dalamnya adalah konflik sosial. Dimana keterlibatan itu merupakan jawab gereja untuk terlibat dalam misi Allah, yaitu mewujudkan kehadiran tanda-tanda Kerajaan Allah, berupa cinta kasih, kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah GKJ Bejiharjo dalam menghadapi konflik Goa Pindul. Oleh karena itu, berbekal teori dan hasil analisa di depan, maka dalam bab ini akan dipaparkan mengenai strategi yang mungkin dapat diperankan oleh GKJ Bejiharjo dalam mengelola konflik Goa pindul.

#### **D. Peran Gereja Dalam Mewujudkan Perdamaian dan Transformasi Konflik.**

Sebenarnya ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh gereja (pelaku-pelaku perdamaian) dalam upaya mewujudkan perdamaian dan transformasi konflik. William Ury mengatakan bahwa peran-peran itu adalah pencegahan, resolusi, dan penahanan.<sup>180</sup>

##### **A.1. Pencegahan (prevention): Peran untuk mencegah konflik menjadi besar.**

###### **a. Pemberi (Provider): Memenuhi kebutuhan.**

Kebutuhan paling dasar manusia (*Basic Human Needs*), yaitu makanan (dan keperluan lainnya untuk hidup), keamanan, identitas, dan kebebasan. Jika kita membantu orang mengatasi satu atau lebih dari kebutuhan ini kita bisa menghindari konflik. Artinya, meski gereja bukan lembaga sosial atau lembaga hukum namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan porsi pelayanan khusus dalam bidang tersebut. Banyak konflik terjadi karena persoalan ekonomi, atau lebih tepatnya karena kemiskinan. Dalam masyarakat Jawa ada yang mengatakan *nek urusan weteng pikiran dadi peteng*. Yang artinya jika sudah berkaitan dengan kebutuhan makan (perut) maka segala cara akan dilakukan bahkan dengan segala cara termasuk harus berkonflik dengan sesamanya. Oleh karena itu peran gereja sebagai provider ini dapat dilakukan melalui terbentuknya Koperasi, kelompok-kelompok usaha, pemberian kredit usaha. Gereja juga dapat memberikan bantuan advokasi bagi orang-orang yang memerlukan

---

<sup>180</sup> <http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/topeace.htm> (20 Agustus 2015)

pendampingan secara hukum. Memberikan perlindungan bagi orang-orang yang merasa terancam keamanannya.

b. Guru (Teacher): Memberi keterampilan untuk menangani konflik.

Kadang-kadang orang melawan hanya karena mereka tidak tahu ada cara lain untuk bereaksi ketika kebutuhan tidak terpenuhi dan perbedaan yang serius muncul. Dengan membantu orang belajar nilai-nilai, perspektif dan keterampilan baru, akan menunjukkan cara yang lebih baik untuk menangani persoalan. Di sinilah pentingnya gereja memberdayakan warga dalam berbagai profesi yang ada, salah satunya adalah warga-warga yang memiliki ketrampilan-ketrampilan dalam hal advokasi. Atau juga gereja dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga perdamaian yang telah ada untuk memberikan pengetahuan melalui seminar atau pelatihan-pelatihan dalam penyelesaian konflik. Jika kita perhatikan, dalam hal penyelesaian konflik sosial, masyarakat masih mempertahankan cara-cara turunan. Artinya menggunakan cara-cara yang telah ada yang diajarkan oleh nenek moyang, misalnya melalui pertemuan warga (rembug kampung), menyerahkan pada para sesepuh desa. Sementara dari masa ke masa konteks yang berubah juga memerlukan pendekatan yang berbeda, seiring dengan pemikiran masyarakat yang berubah. Namun gereja jika masih jujur masih berkuat pada pembinaan pada warga gereja, padahal tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan sesama pemerhati perdamaian memberikan ketrampilan kepada masyarakat dalam hal penyelesaian konflik sosial. Dengan ketrampilan yang diberikan diharapkan akan meminimalisir konflik.

Menurut Nouwen dalam bukunya *Peace Work*, ada tiga hal yang perlu diajarkan oleh gereja bagi warganya untuk dapat mewujudkan perdamaian, yaitu berdoa, perlawanan, dan komunitas.<sup>181</sup>

*Pertama Berdoa.* Dengan berdoa kita akan semakin mengenal bahwa Allah kita adalah Allah sumber kedamaian, Allah yang menghendaki kedamaian. Hal tersebut termanifestasi melalui kehadiranNya ke dunia dalam manusia Yesus. Dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan mendatangkan kedamaian (Yohanes 3 : 16). Dengan kita semakin dekat dan mengenal Allah sumber kedamaian, kita akan

---

<sup>181</sup> Henri Nouwen, *Peacework* mengakarkan budaya damai, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.28.

memiliki spirit hidup dalam perdamaian. Kita akan dimampukan untuk memiliki sikap anti kekerasan. Di dalam doa, kita diajak untuk menyadari keberadaan diri kita (siapa kita di dunia ini). Orang Jawa mengatakan “*mulat sarira hangrasa wani*”, yang artinya kita dapat melihat diri kita sendiri dan mau mengakuinya. Dengan berdoa, kita disadarkan bahwa kita ini ciptaan, dan kita tidak memiliki apapun dan tidak berkuasa atas apapun di dunia ini. Dengan begitu, kita diajak untuk mengakui bahwa tidak semestinya kita merasa berkuasa atas segala sesuatu yang ada termasuk sesama kita, dan menghacurkan yang lain dengan kekerasan. Menurut Nouwen, doa bukan sebatas bekal atau persiapan untuk memperjuangkan damai, namun doa merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan damai.

*Kedua, perlawanan.* Saat ini kita hidup dalam situasi krisis kedamaian. Karena berbagai alasan (agama, golongan, nasionalisme, kedaulatan Negara) semua cara dihalalkan, termasuk perang dan pembasmian sekelompok manusia. Jika kita mau menyadari bahwa penyelesaian persoalan dengan kekerasan juga akan menghasilkan kekerasan, aksi balas dendam, maka mestinya kita berani mengatakan “tidak “ untuk setiap aksi kekerasan yang berkedok mendatangkan kedamaian. Hal itulah yang dimasukkan sebagai sebuah perlawanan. Melawan tidak kekerasan, perpecahan, peperangan dengan kata tidak.

Namun pada kenyataannya, kita sulit untuk mengatakan tidak. Karena hampir setiap hari kita disuguhi dengan berita tentang perang, kekerasan, aksi balas dendam dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu adalah fakta menyedihkan. Namun bagi masyarakat, itu justru sebagai sebuah “hiburan”, dengan kata lain *Bad news is good news*. Padahal secara tidak langsung, hal itu meracuni pikiran kita dan lambat laun mengakar serta menginspirasi hidup kita tatkala kita diperhadapkan pada situasi yang sama seperti dalam berita tersebut. Sebagai contoh, maraknya aksi tawuran antar sekolah sebenarnya tidak lepas dari buah pemberitaan yang diterima oleh anak-anak melalui berbagai media, sehingga menginspirasi untuk melakukan hal yang sama.

Perlawanan memang tidak mudah, karena tentu saja akan mendapatkan tantangan. Dapat berupa sindiran, pengucilan dan bahkan dengan sengaja disingkirkan. Ketika kita mengatakan “tidak” terhadap kekerasan, kita akan dianggap pengecut, tak bernyali, tidak solider dan lain sebagainya. Bahkan kita akan dikenai sanksi sosial.

Seperti cerita Henri Nouwen mengenai temannya yang menolak aksi kekerasan justru ditangkap dan dimasukkan penjara. Tantangan itulah yang seringkali melumpuhkan motivasi kita untuk mengatakan “tidak” terhadap kekerasan, perang dan akhirnya ikut mengatakan “ya” terhadap kekerasan, perang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlawanan harus tetap dihidupi, disemangati, sehingga tidak mudah lumpuh oleh tantangan yang menghadang.

*Ketiga, komunitas.* Pemahaman yang mengatakan bahwa sikap kita akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita hidup benar adanya. Kita berkumpul dengan orang jahat, maka besar kemungkinan kita akan menjadi jahat. Berkumpul dengan orang baik, besar kemungkinan kita akan jadi orang baik. Berkumpul dengan pendendam kita akan menjadi pendendam. Berkumpul dengan orang yang cinta damai, kita akan menjadi orang yang cinta damai. Demikian pula dalam memperjuangkan damai, kita semestinya berkumpul bersama dalam komunitas yang cinta damai, karena akan memberikan motivasi untuk terus berjuang mengatakn “tidak” atas aksi kekerasan, dan memberikan spirit untuk tetap bertahan meski tantangan terus menghadang. Dalam upaya kedua dan ketiga (perlawanan dan komunitas), dapat ditempuh bukan hanya dalam komunitas interen agama, namun juga dapat dilakukan oleh antar agama.

Nilai-nilai perdamaian hanya akan menjadi wacana akademis jika sebatas diketahui tanpa dipraktikkan. Oleh karena itu, gereja akan lebih berdaya guna atau berdampak positif jika nilai-nilai perdamaian itu nampak dalam perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan atau tingkah laku sehari-hari. Pertama, menyampaikan pesan-pesan perdamaian melalui khotbah pada ibadah minggu, ibadah istimewa dan ibadah-ibadah lainnya. Sementara melalui acara khusus, misalnya ibadah perkawinan, upacara pemakaman, bidston-bidston dapat dipakai untuk menyampaian pentingnya semangat hidup dalam perdamaian kepada semua orang. Kedua, menyampaikan pesan-pesan perdamaian melalui kegiatan pemahaman Alkitab (PA). Karena dalam kegiatan PA, kita akan lebih dalam dalam membahas materi tentang perdamaian, hal tersebut dikarenakan adanya interaksi timbal balik, ada tanya jawab, ada refleksi, dan juga dapat mengambil kesimpulan dan tekad sikap selanjutnya yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam PA tentunya akan lebih efektif dalam membentuk paradigma-paradigma jemaat dalam berpikir tentang pentingnya hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ketiga, membangun semangat hidup dalam

perdamaian melalui Katekisasi. Pengajaran kepada generasi muda melalui katekisasi merupakan cara yang efektif dalam menanamkan pentingnya hidup dalam perdamaian dengan semua orang, bahkan dengan alam secara keseluruhan.

Dalam membangun perdamaian ada hal penting yang harus dihidupi oleh siapapun juga, yaitu pengampunan. Sulit terwujud sebuah perdamaian jika tidak ada pengampunan dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun adanya kerendahan hati untuk meminta maaf ketika terjadi konflik meski merasa dipihak yang tidak bersalah. Suatu pengalaman yang pernah saya lakukan adalah datang meminta maaf saat saya mengalami konflik dengan pihak lain. Dengan sedikit mengorbankan harga diri, maka akan beroleh perdamaian selama hidup. Namun sebaliknya jika enggan mengorbankan harga diri sejenak, maka perdamaian mustahil dirasakan sepanjang hidup. Hal itu penting diupayakan dalam kehidupan di semua ranah, baik keluarga, pekerjaan, masyarakat dan bergereja. Karena kita akan terus bertemu dengan pihak lawan konflik, dan jika tidak ada penyelesaian, maka akan selamanya dibayang-bayangi oleh konflik yang tak berujung. Oleh karena itu, perlunya terus mengembangkan sikap pengampunan dan rendah hati seperti yang Kristus ajarkan.

c. Bridge-Builder (Pembangun Jembatan): Membangun.

Konflik sering mengalami eskalasi lebih cepat karena tidak adanya komunikasi, kepercayaan, dan hubungan yang baik. Menciptakan hubungan dapat membangun kepercayaan dan membangun jalan alami untuk komunikasi. Dalam upaya membangun hubungan yang baik, gereja kiranya melakukan introspeksi diri. Hal tersebut berkaitan dengan kenyataan banyaknya gereja yang “membangun menara gading” sementara hubungan atau relasi dengan lingkungan terabaikan.

Ada beberapa hal yang mungkin dapat diterapkan dalam membangun perdamaian guna mencegah terjadinya konflik baik dalam hidup berkeluarga maupun di tempat kerja dan dalam hidup bermasyarakat.

*Pertama, menerima keberadaan orang lain.* Konflik seringkali terjadi karena tidak adanya penerimaan terhadap keberadaan orang lain yang berbeda atau identitas yang berbeda (karakter, pola pikir, sifat, agama, ras, suku, agama, budaya, kebiasaan, gaya hidup). Setiap pribadi atau kelompok pasti memiliki kekhasan yang sudah tertanam selama bertahun-tahun (yang kemudian disebut dengan identitas), dan hal tersebut

tidak bisa dipaksa untuk berubah menjadi seperti yang kita mau. Bahkan setiap individu kepribadiannya telah terbentuk dari kecil dalam lingkungan keluarganya dengan latar belakang orang tuanya masing-masing. Artinya identitas setiap individu yang sudah terbentuk sejak lama itu tentu saja masih terlihat dan terbawa ketika kemudian hidup bersama dengan pasangannya, maupun hidup bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Sehingga ketika bertemu dengan individu lain, sangat besar kemungkinan terjadi persinggungan-persinggungan yang mengarah kepada konflik. Oleh karena itu penerimaan terhadap individu ataupun komunitas lain yang berbeda sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik. Hal tersebut dikarenakan fakta telah membuktikan, jika setiap individu maupun kelompok tidak dapat menerima keberadaan pribadi atau kelompok lain yang berbeda, maka timbulah konflik yang disebabkan faktor identitas.

*Kedua, komunikasi.* Artinya selalu mengupayakan adanya komunikasi. Karena dengan komunikasi, ketika seseorang menceritakan apa yang menjadi kehendaknya, maka kita akan mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka. Demikian pula sebaliknya, ketika kita menceritakan apa yang kita kehendaki, maka orang lain juga akan mengerti apa yang menjadi kehendak kita. Dengan begitu kita akan saling terbuka dan saling memahami. Sehingga tidak ada kehendak yang dipaksakan, maupun kehendak yang diabaikan. Komunikasi sangat penting, karena tanpa adanya komunikasi seringkali fenomena gunung es mengancam dan berbuah menjadi konflik. Tanpa adanya komunikasi, yang biasa terjadi adalah setiap pribadi hanya memendam pendapatnya, kekecewaannya, harapannya yang tidak terwujud atau bahkan merasa terabaikan.

*Ketiga, menjalin relasi.* Cara yang ketiga ini tentu saja lebih dari pada komunikasi (cara kedua). Komunikasi dapat saja diciptakan dalam rangka sebuah kepentingan (untuk mencapai tujuan tertentu dalam dunia bisnis, mau tidak mau harus menjalin komunikasi), artinya komunikasi dapat terjadi hanya sebagai formalitas, atau bahkan hanya tuntutan adat kesopanan. Sementara di dalam relasi terdapat iketan yang lebih dalam, dan itu dapat mengikat erat sebuah hubungan baik dalam keluarga, dunia kerja, maupun dalam masyarakat. Relasi yang terbangun baik dengan pihak lain di manapun kita berada, tentu akan menjadi kekuatan untuk mencegah terjadinya konflik. Orang Jawa memiliki falsafah dalam menjalani kehidupannya di manapun dia berada, yaitu *Manjing Ajur Ajer*. *Manjing* artinya melekat. Di manapun kita berada, kita diajak

untuk bukan sekedar ada, sekedar menumpang tempat dan nama, tapi benar-benar memiliki hubungan batin, hubungan emosional dengan individu atau komunitas yang ada di sekitar kita. *Ajur* artinya melebur. Menjadi satu dengan individu maupun komunitas yang ada tanpa memaksakan kehendak pribadinya. *Ajer* artinya mencair. Menjadi satu dengan individu maupun komunitas yang ada tanpa dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan dan bahkan tidak mengedepankan identitas bawaannya. Ada banyak wadah yang dapat digunakan untuk menjalin relasi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya melalui kegiatan ronda kampung, melalui kegiatan olah raga bersama masyarakat, gotong royong, dan kesenian.

## **A.2. Resolusi (Resolution): Peran jika konflik tak terhindarkan.**

### **a. Mediator: Mendamaikan konflik kepentingan.**

Mediator tidak berusaha untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan mencoba untuk memahami penyebab konflik dan membantu para pihak memecahkannya. Mendengarkan orang-orang dalam konflik, bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka inginkan, menyarankan pendekatan yang mungkin, dan mendesak mereka untuk berpikir tentang akibat tidak mencapai kesepakatan. Dengan kata lain membantu mengurai benang kusut atas persoalan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam peran ini, gereja dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih berkuasa, misalnya pemerintah desa, bekerjasama dengan pemuka agama yang lain.

Harus disadari bahwa menanamkan nilai-nilai perdamaian adalah panggilan agung dari Tuhan. Dengan begitu, tentu kita mengimani bahwa Tuhan senang dan turut berkarya atas setiap orang atau kelompok yang berjuang menanamkan nilai-nilai perdamaian. Namun tidak dipungkiri juga, bahwa menanamkan nilai-nilai perdamaian menghadapi banyak tantangan, di antaranya adalah budaya dan sistem kekuasaan. Sebagai contohnya adalah budaya patriakal. Seringkali konflik tidak dapat diselesaikan karena kekuasaan para laki-laki yang dominan di tengah-tengah keluarga. Selain itu budaya “ewuh pekewuh” atau tidak enak, canggung. Seringkali konflik mengalami eskalasi karena persoalan-persoalan yang terpendam, tidak pernah terselesaikan sedini mungkin hanya karena factor “pekewuh” terhadap pihak lain. Demikian pula budaya saving-face, atau harga diri, atau nama baik atau gengsi. Seringkali perdamaian terhambat karena pribadi atau komunitas lebih mengedepankan ego-nya demi harga diri atau nama baik. Dan inilah yang diakui tidak mudah untuk

dihadapi dalam membangun perdamaian terlebih di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Dengan paham bahwa di hadapan Tuhan semua sama, tanpa mempertahankan status, setiap orang layak untuk mengakui kesalahan jika memang bersalah, dan memberi pengampunan kepada siapapun juga. Belajar dari kisah Raja Daud yang mau merendahkan diri meski dia seorang raja setelah diingatkan oleh nabi Natan atas segala dosa dan kesalahannya.

b. Equalizer: Demokratisasi kekuasaan.

Setiap konflik berlangsung dalam konteks kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan sering menyebabkan pelecehan dan ketidakadilan. Setiap dari kita memiliki kekuatan, pengaruh atas pihak di sekitarr kita. Individualitas, pengaruh kita mungkin kecil, tapi secara kolektif, hal itu dapat besar. Sehingga mampu memberdayakan yang lemah dan tidak terwakili sehingga mereka dapat menegosiasikan resolusi adil dan saling memuaskan. Gereja sebagai pihak yang netral dapat melakukan pendekatan terhadap para penguasa atau pemangku jabatan. Banyak hal yang dapat ditemukan bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap persoalan yang terjadi dimasyarakat seringkali tidak mampu menjawab atau menyelesaikan masalah.hal tersebut dapat saja terjadi karena pemerintah hanya melihat dari belakang meja kerjanya, sehingga perlu masukan-masukan informasi yang tepat. Gereja sebagai bagian dari masyarakat tentunya dapat menggali informasi dan menemukan titik persoalan yang terjadi. Dengan begitu, gereja juga dapat memberikan informasi yang tepat kepada pemerintah atau pejabat terkait sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan bagi permasalahan yang ada.

c. Penyembuh (Healer): Memperbaiki hubungan terluka.

Di dasar banyak konflik yang ada adalah emosi - marah, takut, malu, kebencian, ketidakamanan, dan kesedihan. Dan luka-luka itu mungkin dalam. Bahkan jika konflik tampaknya diselesaikan setelah proses mediasi, ajudikasi, atau voting, luka-luka mungkin tetap ada. Hal tersebut tentunya berbahaya jika konflik terjadi kembali. Konflik tidak dapat dianggap sepenuhnya diselesaikan sampai hubungan cedera telah mulai sembuh.

### **A.3. Penahanan (Containment): Peran ketika konflik tidak terselesaikan:**

a. Saksi (Witness): Memperhatikan eskalasi.

Konflik destruktif terjadi melalui berbagai tahap, dari ketegangan ke konflik terbuka ke kekerasan. Dengan menonton dengan hati-hati, Saksi dapat mendeteksi sinyal peringatan, yang jika bertindak, dapat mencegah eskalasi konflik dan bahkan menyelamatkan nyawa. Saksi juga bisa berbicara untuk membujuk pihak untuk menghentikan pertempuran dan memanggil perhatian orang lain yang bisa campur tangan.

b. Penjaga Perdamaian (Peacekeeper): Memberikan perlindungan.

Ketika aturan dilanggar dan batas pertempuran terlampaui, masyarakat perlu bertindak dengan tenaga kuat yang paling minimal diperlukan untuk menghentikan konflik yang berbahaya. Ketika dua anak berkelahi, orang dewasa dapat melangkah di tengah dan, jika perlu, secara fisik memaksa dua terpisah. Para Penjaga Perdamaian terbaik tidak pernah bertengkar. Mereka mencapai tujuan mereka dengan penanggulangan lebih awal dan menggunakan pendekatan persuasif.

## **B. Strategi Perdamaian GKJ Bejiharjo Dalam Transformasi Konflik Goa Pindul**

Secara khusus bagi GKJ Bejiharjo, karena konflik Goa Pindul hingga saat ini masih belum selesai, maka ada beberapa peran atau strategi yang dapat dilakukan, peran atau strategi tersebut yaitu:

### **B.1. Mediator : Mendamaikan konflik kepentingan.**

Gereja (GKJ Bejiharjo), dapat melakukan peran yang pertama yaitu sebagai mediator. Mediator tidak berusaha untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan mencoba untuk memahami penyebab konflik dan membantu para pihak memecahkannya.<sup>182</sup> Mendengarkan orang-orang dalam konflik, bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka inginkan, menyarankan pendekatan yang mungkin, dan mendesak mereka untuk berpikir tentang akibat tidak mencapai kesepakatan. Dengan kata lain membantu mengurai benang kusut atas persoalan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam peran ini, gereja dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih berkuasa, misalnya pemerintah desa, bekerjasama dengan pemuka agama yang lain.

---

<sup>182</sup> Ronald S. Kraybill, dkk, *Peace Skills*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h.43.

Dalam perannya sebagai Mediator, sebelum melakukan mediasi maka GKJ Bejiharjo harus melakukan tahapan awal, yaitu PRA MEDIASI. Hal yang harus disadari dalam tahap ini adalah pemahaman bahwa pra-mediasi tidak sama dengan mediasi. Mediasi merupakan pertemuan antara kedua belah pihak yang berkonflik yang ditemani oleh mediator dalam upaya menyelesaikan konflik, mulai dari pengenalan, penceritaan atau pemaparan kisah, penyelesaian atau pemecahan masalah, dan persetujuan atau kesepakatan.<sup>183</sup> Sedangkan pra-mediasi adalah tahapan yang harus dilalui sebelum mediasi itu terjadi. Pra-mediasi dilakukan kepada kedua belah pihak yang berkonflik dan kedua belah pihak belum saling bertemu. Pra-mediasi merupakan tahapan dengan maksud agar kedua belah pihak yang berkonflik pada akhirnya dengan penuh kesadaran bersedia untuk duduk bersama menemukan solusi atas masalah mereka secara bersama pula.<sup>184</sup>

Dalam kasus konflik Goa Pindul, tentu akan membutuhkan kerja keras yang lebih dalam melakukan pra-mediasi, karena pemerintah pernah mencoba melakukan mediasi namun gagal. Berarti ada pekerjaan ekstra untuk membangun kepercayaan kembali dan membangun kesediaan untuk melakukan mediasi kembali. Adapun proses yang harus ditempuh dalam pra-mediasi adalah sebagai berikut<sup>185</sup>:

a. Fokus pada usaha membangun kepercayaan dan menggali informasi.

Akan sulit terjadi sebuah mediasi jika pihak-pihak yang berkonflik tidak memiliki kepercayaan terhadap pihak yang akan memediasi maupun pihak yang mempersiapkan sebuah mediasi. Oleh karena itu pra-mediasi merupakan tahapan untuk membangun kepercayaan kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam pra-mediasi konflik Goa Pindul, sebaiknya dilakukan oleh pihak yang memang belum pernah terlibat dalam mengurus kasus tersebut, terlebih lagi kiranya tidak lagi dari pihak pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan salah satu pihak yaitu pemilik lahan sudah tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang dianggap membela dan berpihak kepada para pengelola. Dalam situasi inilah GKJ Bejiharjo memiliki peluang untuk hadir sebagai pihak yang kiranya dapat dipercaya karena sebagai pihak yang netral.

---

<sup>183</sup> Ibid.57-59.

<sup>184</sup> Ibid.63-67.

<sup>185</sup> Ibid.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun kepercayaan:

- Datang berkunjung kepada pihak-pihak yang berkonflik yaitu pemilik lahan dan pengelola Goa Pindul kemudian memperkenalkan diri.
- Selanjutnya menyampaikan maksud atau tujuan kedatangan yaitu ikut prihatin atas konflik yang terjadi.
- Selain itu menyampaikan bahwa kedatangannya ingin belajar mengetahui dan memahami kronologi konflik Goa Pindul secara detail beserta dengan alasannya.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya menggali informasi:

- Kerena konflik Goa Pindul sudah menjadi konsumsi publik, dengan begitu tentunya ada banyak media yang meliput dan menyampaikan isu-isu maupun opini-opini mengenai konflik tersebut, baik dari pihak pengelola maupun dari pihak pemilik lahan. Oleh karena itu, informasi dapat digali melalui media sosial (website: [www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com), blog: <http://gunungkidulpost.com>, Koran: Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat).
- Melakukan wawancara dengan pemerintah Desa Bejiharjo.
- Melakukan wawancara dengan pemerintah daerah, yang pernah menangani konflik tersebut, dalam hal ini didelegasikan kepada dinas pariwisata
- Menggali informasi baik kepada pakar hukum maupun ke Badan pertanahan.
- Menggali informasi dari pihak kepolisian tentang kasus yang dilaporkan oleh pemilik lahan.
- Dan yang paling utama adalah menggali informasi secara obyektif dari pihak-pihak yang berkonflik tersebut secara langsung, yaitu pihak pengelola dan pemilik lahan.

b. Memberikan penjelasan tentang mediasi.

Yang menjadi catatan dalam tahapan ini adalah setelah kepercayaan itu terbangun (yang tentunya memakan waktu yang tidak singkat), maka mulai dicoba untuk membicarakan tentang apa itu mediasi. Belajar tentang mediasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah dan dikomparasikan dengan mediasi yang kita maksudkan. Tentang jalannya mediasi, tahapan-tahapannya, siapa saja yang akan terlibat dalam mediasi tersebut, tentang kesepakatan tempat terjadinya mediasi, dan tentang waktu

pelaksanaan mediasi. Dengan maksud agar pihak-ihak yang berkonflik tersebut mengetahui proses mediasi yang sebenarnya. Dan harapan akhirnya adalah mereka akan mengambil keputusan untuk bersedia melakukan mediasi tanpa ada unsur paksaan.

c. Fokuskan ke masa depan.

Sangat dimungkinkan pihak-pihak yang berkonflik enggan untuk melakukan mediasi. Dalam hal ini adalah pemilik lahan yang lebih banyak berjuang melalui jalur hukum. Sementara pihak pengelola hanya diwakili oleh pengelola awal yaitu saudara Subagyo (Pokdarwis Dewa Bejo). Oleh karena itu perlu dilakukan sapaan-sapaan reflektif yang dapat memancing baik pemilik lahan maupun pengelola memikirkan tentang masa depannya daripada apa yang harus dipertahankan saat ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya:

- Sudah berapa lama konflik ini terjadi?
- Sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan?
- Tidak adakah solusi lain selain apa yang sedang mereka tempuh saat ini?
- Bagaimana jika cara yang mereka tempuh saat ini tidak membuahkan hasil?
- Apa dampaknya bagi keluarga, bagi kehidupan masyarakat?

d. Koordinasikan cara menghubungi pihak-pihak yang berkonflik.

Tentu tidak mudah untuk melakukan komunikasi atau pertemuan dengan pengelola dan pemilik lahan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu perlu mengetahui kapan pihak-pihak tersebut dapat ditemui dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Sebagai contoh; Pernah penyusun mencobanya, pasca penyusun bertemu dengan pihak pengelola dan mendengarkan informasi dari pengelola, sedianya hendak penyusun lanjutkan bertemu dengan pemilik lahan, tapi setelah melakukan komunikasi melalui telepon ternyata pemilik lahan sedang berada di luar negeri. Oleh karena itu solusinya mungkin perlu terlebih dahulu dilakukan perjanjian pertemuan, baik waktu dan tempatnya.

e. Menghubungi tokoh-tokoh yang setara kedudukannya dalam organisasi.

Selama ini pihak pengelola selalu diwakili oleh ketuanya (khususnya saudara Subagyo sebagai ketua Pokdarwis Dewa Bejo) dalam setiap pertemuan, sedangkan pemilik lahan selalu diwakili oleh LSM. Hal tersebut tentu sangat tidak tepat, karena jika

melihat sejarah awal, konflik ini adalah konflik individu yang kemudian berkembang menjadi konflik individu melawan kelompok. Oleh karena itu yang perlu dihubungi adalah pengelola awal yang membuka Goa Pindul yang memang dipersoalkan oleh pemilik lahan dengan pemilik lahan itu sendiri.

f. Waspada terhadap aneka perbedaan budaya.

Perlu diketahui bahwa latar belakang pengelola Goa Pindul adalah asli penduduk desa Bejiharjo dan etnis Jawa, sementara meski pemilik lahan juga penduduk Bejiharjo namun keluarga dari suaminya adalah etnis China. Oleh karena itu, perbedaan latar belakang ini perlu disikapi dengan cermat, misalnya dalam hal karakter penyampaian, dimana orang Jawa cenderung pelan, sementara orang China dengan nada cepat dan lantang “ceplas-ceplos”.

g. Demikian pula perlu ada kesepakatan-kesepakatan, antara lain:

- Siapa saja yang dikehendaki hadir dalam mediasi
- Apa tujuan dari pertemuan tersebut
- Kapan pertemuan tersebut akan dimulai. Namun selain itu juga perlu dipaparkan bahwa dimungkinkan pertemuan itu terjadi tidak hanya satu kali, oleh karena itu juga perlu ada kesepakatan.
- Dimanakah pertemuan itu akan dilaksanakan. Seyogyanya netral dan tenang.
- Siapakah yang dikehendaki oleh kedua belah pihak untuk menjadi mediator.

Setelah pra-mediasi terlaksana, barulah dilanjutkan dengan mediasi. Dalam tahap akhir pra-mediasi telah dibahas siapa yang dikehendaki sebagai mediator. Maka yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang berkonflik itulah yang akan menjadi mediator. Jika gereja berperan melakukan pra-mediasi, mungkin saja gereja akan ditunjuk sebagai mediator, namun dapat juga sebaliknya. Andai gereja ditunjuk sebagai mediator, memang dapat menjadikan mediasi sebagai salah satu media atau cara untuk mewujudkan transformasi konflik yaitu menuju kearah perbaikan<sup>186</sup>, sebab:

- a. *Mediator transformatif aktif* berupaya menolong pihak-pihak yang bertikai mencapai potensi mereka sebagai manusia sepenuhnya. Dengan cara berinteraksi agar mampu menumbuhkan kesadaran diri yang sehat; mempersilakan

---

<sup>186</sup> Ronald S. Kraybill, dkk, *Peace Skills*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h.27-28.

merumuskan dan mengungkapkan aneka pilihan, harapan, kebutuhan dan impian mereka; menolong mereka menjajaki segala kemungkinan sampai menemukan apa yang mereka cari; serta mendorong agar mereka bertanggung jawab atas kehidupan dan persoalan-persoalan mereka sendiri. Jadi mediasi memberdayakan orang untuk mengambil aneka keputusan sendiri tentang masalah yang mereka hadapi, mendorong tingkah laku yang lebih bertanggung jawab, mediasi memberi peluang terjadinya penyelesaian yang tulus, mediasi mengurangi ketergantungan pada orang lain, mediasi memunculkan perasaan kontrol atas kehidupan mereka sendiri (Empowerment / Pemberdayaan).

- b. *Memperluas kemampuan* untuk menyadari dan menerima harkat dan martabat pihak lain. Menghargai tindak tanduk orang lain; pembicaraan yang santun; mendengar dan menghayati pengalaman pihak lain; mencatat dan menunjukkan persamaan antara dua belah pihak; memfasilitasi pemecahan masalah bersama; memberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki hubungan. (Recognition / Pengakuan).

Meski begitu, bagi gereja tidak mudah untuk memainkan peran atau strategi ini. Sebab gereja dalam hal ini lembaga harus terjun langsung ke lingkaran konflik, yaitu harus bersinggungan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, berperan sebagai seorang mediator memang harus memiliki ketrampilan khusus dan bersikap netral. Begitu pula mengenai komitmen sebagai mediator. Mengingat proses yang panjang, harus fokus dan intens dalam melakukan pra mediasi serta proses mediasi, maka siapapun itu harus meluangkan waktu khusus. Sebagai mediator harus menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki pihak-pihak yang berkonflik. Demikian pula sulitnya memediasi pihak yang berkonflik dengan pihak lebih dari dua. Tentu sampai saat ini sulit mendapatkan warga gereja yang mampu memerankan sebagai mediator dalam skala konflik sosial. Jadi, pertanyaan awal bagi gereja adalah siapa yang akan ditunjuk sebagai seorang pelaku tahap pra mediasi? Dan andai kedua belah pihak setuju menunjuk gereja sebagai mediatornya, siapa yang akan berperan? Bagaimana dengan tujuan transformasi melalui mediasi jika akhirnya tidak ditunjuk sebagai mediator?

## **B.2. Equalizer: Demokratisasi kekuasaan.**

GKJ Bejiharjo dapat mengambil dan melakukan peran equalizer. Gereja sebagai pihak yang netral dapat melakukan pendekatan terhadap para penguasa atau pemangku jabatan dengan cara mengevaluasi kebijakan atau program pemerintah dalam mengelola konflik Goa Pindul. Banyak hal yang dapat ditemukan diberbagai kasus bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap persoalan yang terjadi dimasyarakat seringkali tidak tepat, tidak sesuai dengan tujuan atau sasaran, sehingga tidak mampu menjawab atau menyelesaikan masalah. Hal tersebut dapat saja terjadi karena pemerintah hanya melihat dari belakang meja kerjanya, atau terjadi perbedaan sudut pandang, atau terjadi perbedaan pendapat mengenai sebuah persoalan sosial. Dengan begitu perlu masukan-masukan informasi yang tepat melalui program evaluasi. Namun yang perlu diingat bahwa evaluasi pada prinsipnya bukan dalam rangka menghakimi sebuah program atau kebijakan, namun hanya menyampaikan realita lapangan sebagai dampak dari sebuah kebijakan.<sup>187</sup>

Jadi kunci tujuan evaluasi adalah<sup>188</sup>:

- a. Membuat para pembuat kebijakan dan orang berpengaruh lainnya menjadi peka terhadap isu-isu konflik.
- b. Membantu mereka untuk memikirkan kembali dan menyesuaikan kerangka kebijakan dengan mempertimbangkan simensi konflik.

Gereja sebagai bagian dari masyarakat tentunya dapat menggali informasi dan menemukan titik persoalan yang terjadi. Dengan begitu, gereja juga dapat memberikan informasi yang tepat kepada pemerintah atau pejabat terkait sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan bagi permasalahan yang ada. Dalam arti gereja dapat memberikan evaluasi atas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, agar dapat memberikan masukan atau evaluasi kepada pemerintah atas kebijakan yang telah mereka ambil, maka perlu dilakukan penelitian dilapangan atas pemberlakuan kebijakan tersebut berserta hasil-hasilnya.

---

<sup>187</sup> FaridaYusufTayibnapis, *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.4.

<sup>188</sup> Simon, Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta: British Council Indonesia, 2001), h.79.

Adapun tahapan proses Evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Alasan atau dasar pemikiran evaluasi.

Berdasar pada cara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Gunungkidul atas konflik Goa Pindul dengan penerbitan SK Bupati, maka perlu dilakukan evaluasi. Hal itu bertujuan untuk melihat apakah penanganan tersebut sudah tepat, menjawab persoalan pihak-pihak yang berkonflik, serta dapat menyelesaikan konflik. Dengan diadakannya evaluasi diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam penyelesaian konflik Goa Pindul. Demikian juga dapat mengambil kebijakan yang tepat bagi penyelesaian konflik-konflik ditempat lain.

Dalam program evaluasi ini, direncanakan menggunakan metode Kirkpatrick (*Reaching, Learning, Behavior, Result*).<sup>189</sup> Metode tersebut digunakan sebagai media evaluasi, dikarenakan program penanganan konflik telah dilakukan oleh pemerintah dengan penerbitan SK Bupati. Melalui metode ini diharapkan akan mampu melihat hasil dari diterbitkannya SK Bupati sebagai upaya penanganan konflik tersebut. Bagaimana implikasinya bagi pihak-pihak yang berkonflik. Apakah penangan konflik tersebut berlaku holistik sampai tingkat pemahaman atau pengetahuan serta teraplikasi dalam perilaku bersama. melalui metode ini diharapkan dapat melihat hasil penanganan secara keseluruhan, sehingga dapat dilihat dampaknya. Dengan begitu hasil dari evaluasi dengan metode Kirkpatrick ini kiranya akan menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam menangani konflik Goa Pindul serta konflik-konflik yang lain.

b. Deskripsi perencanaan program dan hasil yang diharapkan.

Pemerintah mengeluarkan SK Bupati No. 316/KPTS/2013, dengan harapan akan menyelesaikan konflik pengelolaan. Dengan begitu diharapkan antara pengelola dan pemilik lahan tidak akan lagi mempersoalkan tentang hak pengelolaan Goa Pindul. Alasan diterbitkannya SK Bupati:

1. Perlu dikelola oleh pemerintah daerah karena bertujuan untuk kelestarian alam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan segenap pemangku kepentingan.

---

<sup>189</sup> <http://www.kirkpatrickpartners.com/OurPhilosophy/TheKirkpatrickModel>, (17 Agustus 2015)

2. Agar ada kepastian hukum, pelayanan kepada wisatawan, ketertiban dan keamanan, perlu menunjuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Gunungkidul sebagai pengelola Goa Pindul

Inti keputusan dari SK Bupati:

1. Mulai 1 November 2013 obyek wisata dan taman rekreasi Goa Pindul dikelola pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul dengan menunjuk Disbudpar Gunungkidul sebagai pengelola.
2. Tugas pengelola (Disbudpar):
  - 2.1. Menata kawasa Goa Pindul untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan wisatawan.
  - 2.2. Menyusun standar layanan kepada wisatawan yang meliputi ticketing, pemanduan, ketentuan teknis yang lain guna menjamin ketertiban dan keamanan kawasan.
  - 2.3. Mengkoordinasikan segenap pelaku usaha pariwisata dalam penataan kawasan Goa Pindul.
  - 2.4. Melaporkan secara berkala kepada Bupati Gunungkidul.
3. Ketentuan teknis wajib diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak SK ditetapkan.

c. Fokus pertanyaan evaluasi.

- Apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dengan terbitnya SK Bupati?
- Apakah isi dari SK Bupati diketahui dan dipahami maksudnya?
- Apakah SK Bupati telah diberlakukan dan ada fungsi atau dampaknya?
- Hasil dari terbitnya SK Bupati tersebut?

d. Metode Evaluasi.

d.1. Desain atau Model Evaluasi.

RLBR (REACTION, LEARNING, BEHAVIOR, RESULT)

Untuk mengevaluasi program penanganan konflik Goa Pindul yang dilakukan oleh pemerintah daerah Gunungkidul, maka akan digunakan metode evaluasi

dari Kirkpatrick.<sup>190</sup> Apa yang telah dicapai dari program pemerintah tersebut, apakah telah diberlakukan dan apakah memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Apakah kebijakan tersebut memberikan pembelajaran bagi pihak-pihak yang berkonflik dengan adanya pengertian terhadap kebijakan yang ada, perubahan pola pikir dan pengetahuan. Apakah ada perubahan sikap atau perilaku atau tindakan setelah kebijakan pemerintah itu diberlakukan. Dan yang terakhir harapannya adalah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan konflik Goa Pindul maupun konflik dengan konteks yang berbeda. Tujuannya untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah telah diberlakukan serta dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik serta menghasilkan dampak positif dilapangan.

#### d.2. Prosedur penentuan sample.

Dalam upaya evaluasi tentang pemberlakuan SK Bupati tersebut diatas, maka akan diadakan penelitian terhadap beberapa stakeholder, yaitu:

- Pemilik lahan selaku pihak yang mempersoalkan pengelolaan Goa Pindul (1 orang).
- Kelompok pengelola. Meski kelompok pengelola yang merintis pengelolaan Goa Pindul hanya satu yaitu Dewa Bejo, namun kini pengelola telah berkembang dan berjumlah 10 kelompok. Maka akan dilakukan penelitian terhadap ketua-ketua kelompok pengelola yang berjumlah 10 orang.
- Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul sebagai pengelola yang ditunjuk pemerintah daerah Gunungkidul, maka akan dilakukan penelitian tentang pengaplikasian isi dari SK Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul.
- LSM sebagai pendamping pemilik lahan, maka akan dilakukan penelitian kepada pemimpin LSM pendamping pemilik lahan.

---

<sup>190</sup> Donald L. Kirkpatrick & James D. Kirkpatrick, *Implementing The Four levels*, (Berret Koehler Publisher, 2007), h.6-7.

d.3. Indikator dan Ukuran.

KOMPONEN	DESKRIPSI	INDIKATOR	PERTANYAAN HASIL	PENGUM PULAN DATA
<b>REACTION</b>	<b>Tingkat partisipasi bereaksi atas training:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberlakuan</li> <li>• Penerimaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagaimana perasaan anda dengan diterbitkannya SK Bupati</li> <li>➤ Apakah SK tersebut menjawab persoalan?</li> </ul>	wawancara
<b>LEARNING</b>	<b>Sejauh mana pengetahuan tentang isi SK Bupati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan</li> <li>• Sikap</li> <li>• Skill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah anda tahu isi SK tersebut?</li> <li>➤ Apakah anda tahu tujuan diterbitkannya SK?</li> <li>➤ Apakah SK tersebut benar-benar sudah diberlakukan sesuai dengan isinya?</li> <li>➤ Apakah ada kendala?</li> <li>➤ Sudah tepatkah SK bupati sebagai solusi?</li> </ul>	Wawancara
<b>BEHAVIOR</b>	<b>Bagaimana perilaku pihak-pihak yang berkonflik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan dalam kehidupan sehari-hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah membawa perubahan pelayanan?</li> </ul>	Wawancara

	<b>paska terbitnya SK Bupati.</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah ada perubahan status pengelolaan?</li> <li>➤ Apakah ada dampaknya antara sebelum dan sesudah terbit SK?</li> </ul>	
<b>RESULT</b>	<b>Hasil yang diharapkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh isi dari SK terjabarkan dalam aksi dan sesuai dengan tujuannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah pemberlakuan SK Bupati tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuannya?</li> </ul>	Wawancara

#### d.4. Prosedur Pengumpulan Data.

Dalam pelaksanaan penelitian, dapat menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data. Wawancara yang dimaksud:

*1 tanya jawab dng seseorang (pejabat dsb) yg diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dl surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pd layar televisi; 2 tanya jawab direksi (kepala personalia, kepala humas) perusahaan dng pelamar pekerjaan; 3 tanya jawab peneliti dng narasumber; --- bebas wawancara yg susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaraannya bergantung kpd suasana wawancara; -- individual wawancara yg dilakukan oleh seseorang (pewawancara) dng responden tunggal atau wawancara secara perseorangan; -- kelompok wawancara yg dilakukan thd sekelompok orang dl waktu yg bersamaan; -- konferensi wawancara antara seorang pewawancara dan sejumlah responden atau wawancara antara sejumlah pewawancara dan seorang responden; -- terbuka wawancara yg berdasarkan pertanyaan yg tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya; -- terpimpin wawancara dng memakai pertanyaan yg sudah disiapkan sebelumnya.<sup>191</sup>*

Mengacu pada definisi wawancara tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian, dapat memilih atau menggunakan wawancara sebagaimana yang dimaksud dalam definisi 1 dan 2. Sedangkan pihak yang akan diwawancarai adalah

<sup>191</sup> <http://artikata.com/arti-356604-wawancara.html>, (7 Mei 2014).

tunggal atau perorangan. Sementara bentuknya adalah wawancara terpimpin, artinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan metode evaluasi Kirkpatrick.

d.5. Prosedur Proses Data.

Penelitian akan dilakukan dengan cara kunjungan kepada para Stakeholder secara berkesinambungan, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi keterputusan data dan memudahkan dalam mengelompokkan hasil wawancara. Setiap wawancara akan dimasukkan sebagai dokumen wawancara dalam bentuk verbatim (hasil percakapan). Setelah dilakukan penelitian dengan wawancara, maka data yang didapat akan diproses dengan cara dikumpulkan sesuai dengan komponennya, dan stakeholdernya.

e. Metode atau Alat Analisis.

Metode analisa dari hasil penelitian adalah dengan melihat hasil secara kualitatif. Hasil wawancara akan dideskripsikan ulang secara naratif. Untuk mendapatkan hasil secara kualitatif, maka akan dicari kata-kata kunci dalam setiap hasil percakapan sesuai dengan komponen yang ada. Yaitu dengan digarisbawahi kata-kata kunci yang telah dideskripsikan secara naratif. Kemudian akan dicatat hal-hal yang penting yang berhubungan dengan pertanyaan.<sup>192</sup>

f. Hasil evaluasi, diskusi atau pembahasan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi.

Dari hasil evaluasi lapangan, maka perlu untuk diolah atau dibahas yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan. Dari kesimpulan itulah gereja dapat menyampaikan masukan kepada pemerintah atas kebijakan yang telah diambil, demikian juga dapat memberikan kritik saran masukan atas kebijakan yang ada, maupun kebijakan baru yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.

Strategi demokratisasi kekuasaan mungkin dapat dilakukan oleh gereja. Namun Peran ini membutuhkan ketrampilan dan waktu ekstra untuk menggali dan mencari informasi, serta menganalisa data. Selain itu, gereja harus terlibat langsung dengan

---

<sup>192</sup> Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h123.

pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah. Memang peran ini juga mengandung unsur transformasi, namun baru sebatas transformasi struktural. Jika menilik peran gereja yang sebenarnya sangat luas, yaitu sebagai agen transformasi bagi manusia secara holistik, dan mengingat bahwa dampak konflik bersifat personal-komunal, maka penting untuk memikirkan transformasi yang bersifat jangka panjang dan holistik.

### **B.3. Transformasi Konflik Goa Pindul**

Konflik yang sering dipandang negatif - destruktif sebenarnya dapat dilihat positif – konstruktif. Transformasi konflik, tidak hanya bertujuan mengakhiri atau mencegah sesuatu yang kurang baik, namun juga untuk memulai sesuatu yang baru dan baik. Harapannya manusia atau masyarakat dapat berubah ke arah perbaikan melalui adanya konflik. Transformasi bertujuan seperti mercu suar yang membimbing perjalanan dari pada hasil yang akan dicapai. Konsep transformasi konflik adalah agar kita tidak terjebak dalam pengulangan berbagai persetujuan, serta memutuskan pola-pola perilaku destruktif dan mengakhiri lingkaran balas dendam. Transformasi konflik berpijak dari akibat sebuah konflik menuju kepada perubahan apa yang hendak dicapai.<sup>193</sup>Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan transformasi adalah tidak sekedar mengupayakan kesepakatan, tetapi perubahan yang bukan hanya luarnya tetapi juga dari dalam. Perubahan akibat konflik disikapi dengan upaya perubahan konstruktif secara holistik.

Bekaitan dengan konflik Goa Pindul yang berdampak pada kehidupan masyarakat Bejiharjo, maka kebutuhan masa depan atau harapan-harapan yang ingin dicapai melalui strategi intervensi transformasi konflik adalah sebagai berikut:

- a. **Personal** (akibat konflik dalam tingkat individu; mempengaruhi emosional, pengetahuan, perilaku, dan spiritual).

GKJ Bejiharjo sebagai benteng moral, etika, dan juga sebagai agen atau duta perdamaian mestinya jeli melihat perubahan masyarakat secara personal. Ketika emosi masyarakat mudah terpancing, dan perilaku masyarakat tak terkendali lagi, bahkan sikap etis atau nilai-nilai moral tidak lagi dihiraukan, berarti ada persoalan dalam kehidupan moral-spiritual setiap warga masyarakat. Artinya kehidupan iman yang selama ini dijalani, ternyata tidak mampu menolong mereka dalam mesikapi realita

---

<sup>193</sup> John Paul Lederach, *Transformasi Konflik*, (Yogyakarta, Duta Wacana University Press, 2005),h.36.

hidup. Muncul pertanyaan, apakah karena masyarakat yang kurang mengerti imannya? Bisa saja, namun jangan-jangan lembaga agama atau tokoh-tokoh agamalah yang belum maksimal (ekstrimnya belum benar) dalam menanamkan nilai-nilai atau ajaran agama yang benar? Bukankah seputar persoalan tersebut yang selalu muncul dalam perdebatan antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dimana Tuhan Yesus selalu mengkritik pengajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang cenderung menekankan ritus-ritus dan aturan agama.

Sebagai contohnya adalah kisah dalam Injil Yohanes 8:1-11, tentang perempuan yang kedapatan berzina dan dibawa oleh ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi nampak jelas memberikan pengajaran yang bersifat legalitas-formalitas bahwa orang yang berzina harus dilempari dengan batu sebagaimana terdapat dalam hukum Taurat (Im 20:10, Ul 22:22-24). Dapat dibayangkan jika lembaga agama justru berperan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam membentuk manusia secara personal baik dalam tingkah laku, emosi maupun spiritualnya, apa yang akan terjadi? Umat atau orang banyak akan bersikap legalistik pula. Mereka akan mudah menghakimi, mudah emosi, tingkahlakunya justru bertentangan dengan spiritualitas yang diharapkan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menggunakan situasi tersebut untuk mentransformasi pemikiran banyak orang baik dalam bertingkah laku, mengelola emosinya, terlebih lagi dalam menghayati spiritualitas mereka. Meski jawabannya terkesan singkat; *“Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu”*. Apakah Tuhan Yesus mentolerir tindakan perempuan yang berzina? Tidak. Dia juga berhasil mentransformasi secara personal perempuan itu; *“Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai sekarang”*.

Oleh karena itu, berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus, sudah menjadi kemestian bagi GKJ Bejiharjo untuk turut mentransformasi personal masyarakat desa Bejiharjo. Transformasi yang diharapkan adalah meminimalkan dampak destruktif yang ditimbulkan oleh konflik Goa Pindul ditingkat individual dan memaksimalkan potensi yang ada ditingkat individual untuk menjadi lebih baik; baik secara fisik, emosional, intelektual, maupun secara spiritual. Adapun harapan masa depan secara personal, yaitu:

- Setiap pribadi warga masyarakat Bejiharjo yang sensitif dan mudah marah diubah menjadi lebih sabar, tidak mudah terpancing emosinya.
- Setiap pribadi warga masyarakat Bejiharjo yang mudah terprovokasi diubah menjadi selektif dalam menerima atau membedakan antara informasi dan isu. Demikian pula dapat mengelola setiap isu-isu sosial dengan lebih bijaksana.
- Setiap pribadi warga masyarakat Bejiharjo yang penuh kecurigaan terhadap orang lain dipulihkan kembali menjadi masyarakat yang permisif dan ramah.

b. **Relasional** (konflik berakibat mempengaruhi relasi sosial: hubungan antar elemen kekuasaan, kekuatan, saling ketergantungan, dan cara komunikasi).

Selain dampak personal, GKJ Bejiharjo juga perlu menyadari adanya dampak relasional atas konflik Goa Pindul, baik antar anggota masyarakat maupun antarpengelola demikian juga dampak relasi dengan pemerintah desa Bejihaarjo dan pemerintah Daerah Gunungkidul. Masyarakat menjadi terkotak-kotak sesuai dengan kelompok dan kepentingannya masing-masing. Dan hal tersebut berdampak pada kenyamanan dan kedamaian Bejiharjo yang sebelum konflik terjadi terjalin indah harmonis.

Dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 4:5-30,39-42, menceritakan tentang kisah pertemuan antara seorang perempuan Samaria dengan Yesus. Melihat sejarahnya, pertemuan tersebut bukan hanya pertemuan antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin, namun juga pertemuan antara dua bangsa yaitu Samaria dan Yahudi. Hal yang juga dipandang tidak lazim, karena kedua bangsa tersebut saling bermusuhan, karena pandangan tentang bangsa yang ber-Tuhan dan bangsa kafir. Keanean tersebut diungkapkan oleh para murid tatkala melihat Yesus bercakap-cakap dengan perempuan tersebut (ayat 27). Namun tentu bukan hanya itu alasannya. Perempuan Samaria tersebut mengalami banyak hal yang memprihatinkan, antara lain penindasan budaya dan politik. Sebab perempuan pada waktu itu hanya dipandang “*second class*” tidak boleh terlibat dalam urusan laki-laki, sehingga pekerjaannya hanya sebatas mengurus rumah tangga (menimba air untuk keperluan rumah tangga dan ternak). Hak bicara, hak berpolitik mereka seakan-akan dicabut.

Demikian juga penindasan seksual sekaligus budaya, sebab dia harus menikah berkali-kali. Diceritakan bahwa perempuan tersebut menikah sampai 5 kali. Tradisi pada waktu

itu, jika perempuan menikah dan ditinggal mati oleh suaminya maka dia harus menikah dengan adik iparnya, begitu seterusnya (pernikahan diturunkan). Perempuan tersebut juga mengalami penindasan moral karena dipandang sebagai wanita yang tidak baik karena pasca menikah 5 kali kemudian tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo). Hal ini berimbas pada penindasan hukum, karena hanya perempuan yang menerima konsekuensinya, sementara kaum laki-laki tidak mendapat tuntutan yang sama dengan perempuan. Perempuan Samaria, juga tertindas dalam kehidupan beragamanya, karena pengalaman imannya dianggap sepele atau nalar mereka rendah, sehingga tidak pantas dan tidak mampu untuk menjadi pemimpin agama (hampir juga terjadi diseluruh dunia). Cerita pengalaman iman mereka sehebat apapun hanya akan dianggap sepele oleh kaum laki-laki.

Perempuan Samaria tersebut seakan terpasung dalam lingkaran budaya dan politik kaum laki-laki. Perempuan yang hak dan martabatnya terijak-injak. Ada kerinduan terwujudnya suatu pembebasan atas penindasan yang mereka alami. Dan kita dapat melihat bahwa portal permusuhan atau penindasan itu telah dirobuhkan tatkala Yesus yang notabene orang Yahudi berkenan menyapa perempuan itu. Perempuan yang haus atau dahaga untuk dipulihkan dan diakui martabatnya mendapatkan jawabnya melalui pertemuan tersebut. Alhasil respon yang muncul adalah sukacita, kegembiraan. Pengalaman yang membebaskan tersebut kemudian ia ceritakan kepada banyak orang. Lagi-lagi Tuhan Yesus menunjukkan tindakan yang transformatif, dengan Dia mendobrak belenggu pengkotak-kotakan dan juga mencairkan kebekuan relasi dan komunikasi yang telah berlangsung lama karena ego masing-masing kelompok. Pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus melalui praksis langsung, yaitu datang dan berkomunikasi dengan perempuan Samaria.

Sedangkan dalam Perjanjian lama, GKJ Bejiharjo dapat belajar dari kisah perseteruan antara Esau dengan Yakub, yang notabene adalah saudara kandung (Kejadian 27-28). Perseteruan yang diawali karena perebutan hak kesulungan (yang tentunya bukan hanya berkaitan dengan status atau kedudukan, tetapi juga berkaitan dengan harta warisan dari Ishak, orang tua mereka). Akibat dari perseteruan tersebut membuat mereka bermusuhan dan terpisah selama bertahun-tahun, sampai mereka menikah dan memiliki anak. Permusuhan tersebut ternyata membuat mereka berdua dan keluarganya tidak sejahtera, tidak damai, dihantui kecemasan, ketakutan, perasaan

bersalah. Bahkan untuk sekedar bertemu pun sudah terlebih dahulu dihantui raasa curiga, kekawatiran dan ketakutan. Namun hal yang menggembirakan adalah dibalik situasi tersebut masih ada kerinduan untuk bertemu dan merajut hubungan kembali. Keinginan untuk memulihkan relasi yang telah rusak.

Oleh karena itu, dalam tahap ini GKJ Bejiharjo perlu untuk turut mentransformasi relasi masyarakat desa Bejiharjo dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Goa Pindul. Transformasi yang diharapkan adalah turut mencoba untuk mengurai atau mencairkan kebekuan komunikasi, memperbaiki relasi, dan mempererat alur-alur komunikasi antar individu yang tadinya terhambat, baik individu maupun kelompok sehingga muncul pemahaman yang baik dan benar atas individu yang lain. Demikian pula menumbuhkan keberanian untuk menjalin relasi serta menhidupkan mimpi untuk menciptakan kembali suasana Bejiharjo yang tenteram dan damai. Adapun harapan masa depan secara relasional, yaitu:

- Masyarakat Bejiharjo yang terpecah diubah untuk bersatu kembali.
- Penerimaan keberadaan kelompok yang berbeda.
- Persaingan tidak sehat antar pengelola, diubah menjadi persaingan sehat dan obyektif.
- Situasi tidak nyaman atau tidak damai diubah menjadi nyaman dan damai.

c. **Struktural** (dampak konflik berkaitan dengan akar-akar konflik yang berhubungan dengan struktur ekonomi, politik, dan sosial).

Pada jaman Tuhan Yesus, ekonomi dan kebijakan politik sepenuhnya dikuasai oleh Negara (Romawi). Yang mana kala itu setiap kebijakan dirasa memberatkan dan menyengsarakan rakyat. Rakyat harus membayar pajak kepada Kaisar (Mat 22:17). Dalam penerapan kebijakan pun banyak menggunakan orang-orang dari kalangan masyarakat lokal, sebagaimana diceritakan dalam kisah Matius pemungut cukai (Mat 9:9-13). Hal tersebut menimbulkan sikap antipati kepada pemerintah, memusuhi pemerintah, termasuk para pegawai pemerintah, meski orang itu adalah orang lokal sebangsa dengan rakyat.

Namun Tuhan Yesus tidak antipati dengan pemerintah dan kebijakannya, demikian jugatidak antipatiterhadap para pegawai pemerintah. Justru Tuhan Yesus mentransformasi paradigma orang-orang pada waktu itu, baik pegawai pemerintah

maupun rakyat. Sebagai contoh dalam kisah Matius pemungut cukai. Kenapa Matius kemudian berubah sikapnya? Kenapa dia kemudian mengembalikan keuntungan yang diakuinya dari hasil korupsi pajak rakyat dan tidak lagi memungut keuntungan pajak yang menyengsarakan rakyat? Karena dia dipulihkan, disadarkan, dihargai oleh Tuhan Yesus, di manusiakan dan dipahami. Peristiwa tersebut tentunya juga disaksikan oleh banyak orang, sehingga pastilah keputusan Matius tersebut juga didengar oleh sesama pemungut cukai lainnya, yang tentu sangat mungkin turut mempengaruhi pemikiran mereka. Sedangkan dalam kisah pembayaran pajak kepada Kaisar, Tuhan Yesus menegaskan bahwa membayar kepada Kaisar sah-sah saja karena Kaisar adalah pemimpin Negara yang memerlukan biaya untuk kelangsungan Negara, hanya saja berikan sesuai dengan hak Kaisar.

Oleh karena itu, dalam tahap ini GKJ Bejiharjo perlu untuk turut mentransformasi struktural pemerintah daerah Gunungkidul, demikian pula mentransformasi paradigma masyarakat desa Bejiharjo tentang pemerintah dengan berbagai kebijakannya. GKJ Bejiharjo juga perlu mempromosikan cara-cara penyelesaian konflik yang berprinsip pada anti kekerasan, berkesinambungan, partisipatif (melibatkan masyarakat), dan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun harapan masa depannya secara struktural yaitu:

- Kepercayaan masyarakat Bejiharjo terhadap pemerintah daerah Gunungkidul yang menurun, diubah agar dapat menaruh kepercayaan kembali, memahami kebijakan yang diambil pemerintah, dan bersedia melakukan apa yang menjadi kewajiban atau tanggungjawab sebagai warga masyarakat.
- Pemerintah dapat mengambil kebijakan ekonomi maupun politik yang tepat, adil, bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat serta tidak mengambil keuntungan lebih dari kondisi masyarakat yang sedang berkonflik.
- Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bersifat top-down, namun justru berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- Terwujudnya relasi harmonis antara pemerintah daerah Gunungkidul dengan pemerintah desa bejiharjo dan dengan warga masyarakat Bejiharjo.
- Karena hingga saat ini masyarakat Bejiharjo masih terfokus pada satu destinasi yaitu Goa Pindul, diharapkan pemerintah turut membuka jalan bagi berkembangnya destinasi lainnya di sekitar Bejiharjo. Atau menemukan alternatif potensi-potensi perekonomian selain Goa Pindul. Dengan harapan

agar perkembangan ekonomi masyarakat Bejiharjo tidak mengalami kemandegan.

- d. **Kultural** (akibat konflik berkaitan dengan pemahaman-pemahaman normatif atau nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat).

Masyarakat Bejiharjo tidak ubahnya masyarakat Gunungkidul lainnya yang berkiblat pada nilai-nilai budaya Jawa. Yang menekankan keharmonisan dan menjaga kesatuan. Namun di sisi lain, masyarakat Bejiharjo tidak ubahnya masyarakat Jawa lainnya yang sangat menjaga harga diri atau nama baik seorang maupun kelompoknya. Tatkala harga diri itu terusik, terancam, tersisih, bahkan terenggut, maka munculah perlawanan. Identitas masyarakat Bejiharjo sebagai masyarakat yang ramah, santun, terancam tergerus dengan adanya perselisihan-perselisihan antar anggota masyarakat itu sendiri. Dan pada akhirnya masyarakat cemas nama baik Bejiharjo akan memudar, dan tentunya secara tidak langsung, hal tersebut lama-kelamaan juga akan berdampak pada kelangsungan perekonomian berkaitan dengan berbagai destinasi wisata di Bejiharjo khususnya Goa Pindul. Padahal secara umum masyarakat bejiharjo merindukan identitas Bejiharjo tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu perlu ada penguatan paradigma berbasis budaya (menghidupi nilai-nilai budaya) yang dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian. Sehingga sangat perlu untuk mengenali bilai-nilai budaya lokal, yang masih dapat diterapkan dalam upaya menciptakan perdamaian. Akibat konflik Goa Pindul secara budaya atau kultural yaitu:

- Budaya santun dan ramah akan memudar, diubah untuk tetap menjadi masyarakat yang santun, ramah.
- Kohesi sosial menjadi renggang, sehingga perlu diupayakan terciptanya kesatuan masyarakat.

**RENCANA PROGRAM GKJ BEJIHARJO  
BAGI TRANSFORMASI KONFLIK GOA PINDUL**

		<b>Lebih banyak orang</b>	<b>Orang-orang penting</b>
<b>Transformasi</b>	<b>Persepsi</b>	1. Dalam lingkup internal	1. Warga jemaat GKJ

<p><b>Personal dan Relasional</b></p>		<p>gereja, melalui Khotbah Minggu, PA, Bidston, Sarasehan, GKJ Bejiharjo perlumenekankan arti penting mewujudkan perdamaian. Misalnya tentang kesabaran, tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah marah. Ini penting, sebab konflik Goa Pindul yang berdampak bagi masyarakat luas, ternyata tidak pernah disinggung dalam ibadah atau persekutuan lainnya atau menjadi perhatian khusus bagi gereja. Andai pernah hanya bersifat lintas lalu (resume verbatim poin 14-15).</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jemaat tidak eksklusif.</li> <li>• memiliki kepekaan sosial.</li> <li>• membangun paradigma positif tentang konflik.</li> <li>• tidak mudah jatuh pada apriori negatif.</li> <li>• Jemaat berperan menjadi rantai transformasi bagi jemaat dan masyarakat.</li> </ul> <p>2. Bagi masyarakat umum, GKJ Bejiharjo dapat mengadakan pemutaran film dengan tema-tema seputar konflik sosial. Atau mengadakan</p>	<p>Bejiharjo yang menjadi stakeholder di masyarakat dikumpulkan oleh GKJ Bejiharjo, kemudian dibekali agar dapat menyampaikan pesan-pesan perdamaian dalam forum-forum masyarakat. Contoh; melalui pertemuan RT.</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempengaruhi masyarakat.</li> </ul>
---------------------------------------	--	---	---

		<p>pertunjukan “<i>Guyon maton</i>” karena sedang digemari oleh masyarakat.</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• masyarakat tidak melihat konflik sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun masyarakat juga dapat mengerti bahaya konflik.</li> <li>• mengajarkan arti persatuan, meski dalam perbedaan, menjaga harmoni dalam situasi konflik.</li> </ul> <p>3. Memasang slogan-slogan perdamaian ditempat-tempat strategis (seperti balai desa sebagai pusat pelayanan publik). Slogan-slogan yang sebenarnya sudah dihidupi oleh nenek moyang dan diwariskan kepada masyarakat.</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tetap menjaga persatuan, mencegah renggangnya hubungan. Tetap guyub.</li> </ul> <p>1. GKJ Bejiharjo dapat mengadakan acara-acara budaya (kirab budaya, kenduri/selamatan desa) bekerjasama dengan pengurus desa budaya Bejiharjo atau dengan Dewan kebudayaan Gunungkidul.</p>	
--	--	---	--

	<p><b>Perilaku atau hubungan kelompok</b></p>	<p>Namun sangat disayangkan, karena sebenarnya gereja dapat mengoptimalkan warganya yang menjadi pengurus desa budaya sekaligus anggota Dewan kebudayaan Gunungkidul.</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak sekedar seremoni, tapi menumbuhkan atau memulihkan kembali semangat kebersamaan dan penerimaan.</li> </ul>	<p>1. GKJ Bejiharjo dapat mengadakan pembekalan Majelis, pengurus Komisi, pengurus pepanthan. Den</p>
--	---	---	---

	<b>Keterampilan</b>		<p>gan tema khusus yaitu pentingnya perdamaian besertacarapengelolaan konflik.</p> <p>2. Mengadakan seminar atau workshop mengelola konflik. Pelaksanannya dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang fokus terhadap perdamaian melakukan pelatihan pengelolaan konflik.</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Majelis, pengurus Komisi dan pengurus pewanth memiliki pengetahuan tentang pentingnya misi perdamaian dan pengetahuan tentang cara-cara menghadapi konflik baik di jemaat maupun di masyarakat.</li> </ul>
<b>Transformasi Struktural dan Kultural</b>	<b>Opini publik</b>		<p>1. GKJ Bejiharjo dapat menjadi fasilitator dengan membentuk FGD (focus group discussion) bekerjasama dengan stakeholder desa Bejiharjo dan Pemerintah daerah Gunungkidul. Misalnya</p>

	<p><b>Norma-norma sosial</b></p>		<p>diskusi potensi desa Bejiharjo selain Goa Pindul.</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat tidak terkonsentrasi pada satu potensi destinasi.</li> <li>• Masyarakat mendapatkan wadah untuk menyalurkan aspirasinya dengan santun.</li> <li>• Pemerintah dapat menyaring aspirasi masyarakat Bejiharjo</li> <li>• Pemerintah dapat menyampaikan dan mendiskusikan kebijakannya.</li> </ul> <p>1. Mengadakan jalinan relasi dengan tokoh-tokoh agama. Atau Diskusi tentang kehidupan moral masyarakat (Dialog lintas iman). Hal ini sangat penting mengingat para pemimpin gereja GKJ Bejiharjo belum pernah mendialogkan kondisi Bejiharjo seputar konflik Goa Pindul, dengan pemuka agama yang lain.</p>
--	----------------------------------	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>Perubahan Institusional</b></p>	<p>2. Seminar budaya berkaitan dengan norma-norma dalam masyarakat yang mulai luntur akibat konflik di era sekarang.</p> <p>3. Penerbitan makalah atau artikel yang bersifat membangun perdamaian. Atau pemanfaatan website GKJ Bejiharjo.</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menemukan dampak konflik bagi moral dan spiritual masyarakat Bejiharjo. Dengan begitu dapat menemukan keprihatinan bersama dan mendiskusikan strategi bersama.</li> </ul> <p>1. GKJ Bejiharjo dapat mengadakan diskusi tentang undang-undang, atau studi kebijakan yang melibatkan pakar hukum. Mengkaji peraturan, undang-undang, kebijakan-kebijakan pemerintah.</p> <p><i>Tujuan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ditemukan hal-hal yang dapat mengancam perdamaian,</li> </ul>
--	---	--

			<p>menimbulkan kekerasan, akanterantisipasi sedini mungkin, dengan memberikan input kepada pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selain itu juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untukmencurahkan gagasan atau ide serta harapannya dari sudut pandang hukumkepada pemerintah dengan cara dan tempat yang tepat.</li></ul>
--	--	--	--

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran gereja terhadap persoalan-persoalan sosial, termasuk konflik sosial tidak bisa ditawar lagi karena hal itu merupakan sebuah kemestian. Bukan hanya bagi GKJ Bejiharjo, tapi bagi seluruh gereja di dunia ini. Hal itu didasarkan pada keberadaan gereja sebagaimana dimaksudkan oleh Allah, yaitu penerima tanda-tanda Kerajaan Allah sekaligus media menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah bagi dunia. Semua manusia di dunia ini mendambakan terwujudnya kehidupan yang adil, damai dan sejahtera. Namun realita masih sangat jauh dari dambaan. Oleh karena itu, gereja harus terus berjuang mempromosikan perdamaian bukan hanya melalui mimbar gereja, tapi melalui tindakan konkrit di tengah masyarakat. Hal sangat mendesak, sehingga gereja tidak boleh hanya bersembunyi dibalik zona aman dan nyaman dengan menjauhi realita konflik sosial.

Namun yang menjadi kendala adalah masih banyak gereja-gereja yang memilih zona aman dan nyaman dengan berkilah bahwa persoalan sosial khususnya konflik sosial bukan menjadi bagian dari kehidupan gereja sebagai lembaga agama. Dapat dikatakan gereja masih stagnan dengan kehidupan internal yang bernuansa ritual. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, gereja kini mengalami situasi mendekati krisis teologi. Dengan begitu sangat penting untuk membangun kembali pandangan-pandangan teologi sosial dalam gereja. Perlu untuk menekankan pada umat tentang arti penting keberadaan orang percaya di dunia ini, yang mana bukan hanya untuk menjalin hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga menjalin hubungan horizontal dengan realita sosial.

Demikian pula pandangan bahwa andaikan ingin terlibat dalam persoalan-persoalan sosial, gereja merasa tidak memiliki modal baik potensi atau kemampuan manusianya maupun materi, harus mulai dikikis. Sindrom minoritas, inferior, fobia kristenisasi harus mulai diubah menjadi semangat kepedulian menggunakan potensi yang dikaruniakan Tuhan bagi gereja. Dalam mensikapi konflik, gereja semestinya tidak perlu takut, gereja tidak perlu merasa minder dengan kemampuannya. Sesungguhnya setiap jemaat Tuhan dibekali kemampuan. Salah satunya adalah dengan strategi transformasi konflik.

Seperti disampaikan di depan, bahwa yang dibutuhkan bagi transformasi konflik ternyata kepekaan dan pemberdayaan potensi yang ada di dalam gereja dan masyarakat sekitar gereja. Melalui kearifan lokal, melalui budaya yang sudah ada dan sebenarnya telah kenal oleh masyarakat. Gereja tinggal menghidupi dan menghidupkan bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi gereja, keterlibatan pada masalah sosial harus diberi porsi sama atau sejajar dengan pemenuhan kebutuhan rohani. Hal kecil yang dapat dilihat dalam porsi pelayanan gereja adalah melalui APBG (Anggaran Pendapatan dan belanja Gereja) dan rencana kerja gereja. Yang mana porsi untuk keterlibatan pada masalah-masalah sosial relatif kecil atau sedikit.
2. Penyampaian pesan-pesan perdamaian, kepedulian atau kepekaan sosial seringkali abstrak, baik dalam Khotbah, PA, renungan, bidston dan pelayanan gereja lainnya. Terlebih lagi, gereja seringkali hanya mengikuti tema-tema pelayanan yang telah ditentukan oleh Sinode. Dengan begitu, harus ada kepekaan dan keberanian untuk dapat menjawab kebutuhan jemaat dan masyarakat lokal (teologi kontekstual).
3. Bagi para pendeta, perlu diakui tidak banyak yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam hal persoalan-persoalan sosial, khususnya konflik sosial. Maka perlu mengembangkan kemampuannya melalui studi pribadi.
4. Masih berkaitan dengan no.3, penting bagi sekolah-sekolah teologi untuk memberikan porsi tambah bidang studi tentang konflik sosial. Dengan tujuan akan membekali mahasiswanya tatkala terjun ke gereja dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Artanto, Widi, *Gereja dan Misi-Nya; Mewujudkan kehadiran Gereja dan misi-Nya di Indonesia*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Menjadi Gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2008.
- Banawiratma J.B & Muller J, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Yesus Kristus dan Keterlibatan Sosial Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Becker, Dieter, *Pedoman Dogmatika*, Jakarta: Gunung Mulia, 2000.
- Berger, P.L. *Langit Suci; Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bevans, S.B, *Misi Untuk Abad ke-21*, Maumere: Puslit Candraditia, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Model-model Teologi Kontekstual*, Maumere: Ledalero, 2002.
- Blaw, Johannes, *The Missionary Nature Of The Church*, Secretary, Netherlands Missionary Council; 1961.
- Boehlke, R.R, *Siapakah Yesus Sebenarnya*, Jakarta; BPK Gunung Mulia, 1994.
- Bosch, D.J, *Transformasi Misi Kristen*, Jakarta; BPK Gunungmulia, 2000.
- Burton, John, *Conflict : Human Needs Theory*. New York : St Martin Press Inc., 1990.
- Candra, R.I., *Konflik dalam hidup sehari-hari*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Cooper, T.D, *Menilai tanpa menghakimi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Darmaputera, Eka, *Hidup Yang Bermakna*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Fisher, Simon, dkk, *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: British Council Indonesia, 2001.
- Fletcher, V.H, *Lihatlah Sang Manusia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Gema Teologi*, Yogyakarta: Fakultas Teologi UKDW, 2012.
- Gereja Dan Penegakan HAM*, Yogyakarta; Kanisius, 2008.
- Gereja Kegembiraan Dan Harapan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Hadiwiyono, Harun, *Inilah Sahadatku*, Jakarta; BPK Gunung Mulia, 1991.
- Hardjana, A.M., *Konflik Di Tempat Kerja*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hendricks, William, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Ikbar, Yanuar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Jamil, Mukhsin, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre) IAIN Walisongo, 2007.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kieser, Bernhard, *Moral Sosial: Keterlibatan umat dalam hidup bermasyarakat*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Solidaritas 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Kirkpatrick, D.L & Kirkpatrick, J.D, *Implementing The Four levels*, Berret Koehler Publisher, 2007.
- Knitter, P.F, *Menggugat Arogansi Kekristenan*, Yogyakarta; Kanisius, 2005.
- Kobong, dkk, *Agama Dalam Praksis*, Jakarta; BPK Gunung Mulia, 2003.
- Kraybill, R.S, dkk, *Peace Skills*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pusataka, 1984.
- Kuiper, De, *Missiologia*, Jakarta; BPK Gunung Mulia, 1988.
- Lederach, J.P, *Transformasi Konflik*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, 2005.
- Moffit, Bob dan Tesch, Karla, *Andaikan Yesus Kepala Daerah*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010.
- Nouwen, Henri, *Peacework Mengakarkan Budaya Damai*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- \_\_\_\_\_, *The Road To Peace*, Yogyakarta; Kanisius, 2004.
- Pals, D.L, *Seven Theories Of Religion*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Perwita, A.A.B & Sabban, Nabilla, *Kajian Konflik Dan Perdamaian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Pruitt, D.G dan Rubin, J.Z, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ruck, John, dkk, *Jemaat Misioner*, Jakarta; yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011.
- Rule, J.B, *Theories Of Civil Violence*, University of California Press: 1988.
- Schultheis, M.J, dkk, *Pokok-pokok Ajaran Sosial Gereja*, Yogyakarta; Kanisius, 1988.
- SEAGST Institute of Advanced Pastoral Studies dan Panitia Metode Studi Kasus Jawa, *Studi Kasus Pastoral III-Jawa*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1990.
- Senior, D & StuhlmueLLer, C, *The Biblical Foundations For Mission*, New York; Orbis Books, 1984.
- Singgih, E.G, *Bergereja, Berteologi, dan Bermasyarakat*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi dan Transformasi Pelayanan Gereja Menyongsong Abad Ke-21*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Schirch, Lisa, *Conflict Assessment & Peacebuilding Planning (CAPP)*, (Center for Justice & Peacebuilding Eastern Mennonite University, 2011.
- Smith-Christopher, D.L, *Lebih Tajam Dari Pedang*, Yogyakarta; Kanisius, 2005.

*Spiritualitas Agama-agama untuk Keadilan Dan Perdamaian*, Yogyakarta: Institut DIAN Interfidei, 2011.

Stassen, G.H dan Gushee, D.P, *Etika Kerajaan Mengikut Yesus Dalam Konteks Masa Kini*, Surabaya: Momentum, 2008.

Suseno, F.M, *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1984.

Tayibnapi, F.Y, *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Thomas, N.E, *Teks-teks Klasik Tentang Misi dan Kekristenan Se Dunia*, Jakarta; BPK Gunung Mulia, 2012.

van Kooij, R.A, *Menguak Fakta Menata Karya Nyata*, Jakarta: Gunung Mulia, 2008.

van Niftrik, G.C. & Boland, B.J., *Dogmatika Masa Kini*, Jakarta: Gunung Mulia, 1987.

Windhu, I.M, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

#### **b. Makalah, Peraturan-peraturan**

Makalah acara Konsultasi Teologi Nasional Persekutuann Gereja-gereja di Indonesia dengan tema “Berjuang Mewujudkan Keadilan Dan Perdamaian”, Wisma Bahtera, Cipayung, 31 Oktober – 4 November 2011.

Richard Daulay, Gereja Mengesa Menjadi Berkat Bagi Bangsa, Makalah pada kegiatan Sosialisasi UU No 17 Tahun 2013, di Parapat, tanggal 22 Agustus 2014.

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 316 /KPTS/2013 TENTANG PENUNJUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL SEBAGAI PENGELOLA OBYEK WISATA DAN TEMPAT REKREASI KAWASAN GOA PINDUL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

**c. Media Cetak:**

Kedaulatan Rakyat.

Tribun Jogja

Harian Jogja

**d. Website:**

Bishop Vaughn Mc Laughlin, Potter's House Christian Fellowship, [www.potters-house.org](http://www.potters-house.org).

<http://www.gunungkidulkab.go.id>

<http://www.search-document.com/doc/1/1/teori-konflik-johan-galtung.html>. (1 Mei 2014)

<http://artikata.com/arti-356604-wawancara.html>, (7 Mei 2014)

<http://www.kirkpatrickpartners.com/OurPhilosophy/TheKirkpatrickModel>, (17 Agustus 2015)

<http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/boul7514.htm> (20 Agustus 2015)